

VOLUME 1 NO. 1: JUNI 2022

Policy and Maritime Review

Published by: Universitas Hang Tuah

Email: pmr.journal@hangtuah.ac.id

Public administration doctoral program ~ Faculty of social and political sciences

Editorial Address:- Jl. Arief Rahman Hakim No.150, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60111.

2022

POLICY AND MARITIME REVIEW

Policy and Maritime Review (PMR) is a journal published by Public administration doctoral program, Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah. The theme for the articles related to: maritime, education, health, innovation, service, governance, maritime law, maritime technology, maritime economy and business, maritime social and labour governance, international maritime law and ocean, blue economy, green economy.

EDITORIAL TEAM

Ketua Redaksi

Djoko Siswanto Muhartono

SINTA ID: 6036063

Universitas Hang Tuah, Indonesia

Ketua Editor

Elli Setiyo Wahyuni

SINTA ID: 6148208

Universitas Hang Tuah, Indonesia

Anggota Editor

Daniel Mohammad Rosyid

SCOPUS ID: 6507223604

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Mas Roro Lilik E

SINTA ID: 5997220

Universitas Hang Tuah, Indonesia

Moehleriono

SCOPUS ID: 57198433524

Universitas Hang Tuah, Indonesia

Agus Subianto

SCOPUS ID: 57217912018

Universitas Hang Tuah, Indonesia

Sri Wahyuni

SINTA ID: 6021711

Universitas Hang Tuah, Indonesia

IT & Website Support

Arief Budiman

Universitas Hang Tuah, Indonesia

Diterbitkan Oleh

Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Hang Tuah

Alamat Redaksi

Gedung P. Selaru

Program Doktor Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Hang Tuah
Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya

Website

<https://pmr.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal>

Email

pmr.journal@hangtuah.ac.id

DAFTAR ISI

PELAYANAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KEDIRI

Rofik Rofik..... 1-16

EFEKTIVITAS PROGRAM SURABAYA SMART CITY (SSC) DALAM MEWUJUDKAN SMART ENVIRONMENT

Eki Satria Iqbal, Deasy Arieffiani..... 17-22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR DI DESA KUPANG, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO

Trisnanto Setyo Putra, Tjitjik Rahaju..... 23-34

KAJIAN PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DALAM MEMBANGUN PERSEPSI MASYARAKAT PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

S. Teguh Wiyono, Syaifulah Mahdi, Pandu Briantisno 35-48

ANALISIS KEPEMIMPINAN DALAM MEMBANGUN PERSEPSI MASYARAKAT (Studi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur)

Moestien Adi Puji Pembayu Muattininggar, Teguh Prasetyo, Mahmud Ridho Ardi 49-62

PELAYANAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KEDIRI

Rofik*

¹Universitas Pawayan Daha, Indonesia*Corresponding author: rofik.ay25@gmail.com

Abstrak

Pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di kabupaten Kediri, dalam mengatasi pecandu narkotika, meski ada hambatan yang dihadapi, terutama masalah sarana dan prasarana rehabilitasi. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di kabupaten Kediri?" Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, untuk: (1) mendiskripsikan dan menganalisis rehabilitasi oleh BNNK Kediri dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika; (2) mendiskripsikan dan menganalisis pengembangan infrastruktur lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNNK Kediri; (3) mendiskripsikan dan menganalisis pengembangan budaya atau kultur yang meliputi lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNNK Kediri; (4) mendiskripsikan dan menganalisis kendala BNNK Kediri dalam melakukan rehabilitasi pada penyalahgunaan narkotika. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Latar penelitian adalah kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Pondok Rehabilitasi Al Ghazali Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, Sedangkan Teknik analisis data adalah Teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1992). Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan prinsip triangulasi dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang terlibat didalam BNNK Kediri Sie rehabilitasi baik pegawai BNNK Kediri maupun pasien rehabilitasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri belum dapat mandiri dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri hanya melayani program rehabilitasi rawat jalan dikarenakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri belum mempunyai gedung sendiri, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri menggandeng beberapa Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) untuk program rehabilitasi. Faktor utama baik pendukung maupun penghambat adalah faktor yang berasal dari dalam diri klien seperti motivasi klien ingin sembuh dan klien memiliki niatan yang kuat bahwa klien benar-benar ingin pulih. Hambatan yang di hadapi baik internal maupun eksternal mempengaruhi tingkat keberhasilan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

Kata Kunci: narkotika, rehabilitasi, pelayanan.

Pendahuluan

Penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku di suatu negara, termasuk Negara Indonesia adalah adanya peningkatan kriminalitas dalam masyarakat. Salah satu yang marak pada akhir-akhir ini adalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, dikarenakan saat ini Indonesia mengalami darurat narkoba yang sudah membuat generasi muda bangsa ini menjadi buruk. Hal utama yang membuat hal ini terjadi karena adanya masalah sosial di lingkungan masyarakat, di mana pemerintah Indonesia kurang

adanya tindakan pelayanan dari birokrasi serta strategi dan kurang tegas terhadap hukum. Pengguna-pengguna baru narkoba di Indonesia terus meningkat akan tetapi belum diimbangi dengan pelayanan rehabilitasi yang memadai. Perkembangan atau pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia yang begitu cepat disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga upaya mencegah masuknya barang berbahaya itu menjadi tantangan terberat bagi aparat penegak hukum juga. Penyalahgunaan narkoba yang semakin merebak dan sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, pada tahun 2017, jumlah pengguna Narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa atau sekitar 1,77 persen dari jumlah penduduk Indonesia mengalami ketergantungan Narkoba. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta diantaranya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Di sisi lain, jumlah korban meninggal dunia akibat penggunaan Narkoba selama kurun 2016-2017 mencapai 15.000 jiwa. Artinya, setidaknya 41 jiwa melayang perhari dengan 78 persen terjadi pada anak muda usia 19-21 tahun.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia Internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat mengurangi angka peredaran gelap prekursor narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir. Pemerintah Indonesia telah bertekad, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecendrungan yang semakin mengkhawatirkan. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi sebuah permasalahan di mana masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara (international crime). Kejahatan yang segenap merusak kehidupan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba serta illegal dan masalah narkoba masih menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia.

Dalam masalah kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan sosial seperti penyalahgunaan narkoba juga diperlukannya arah kebijakan, startegi, yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menangani permasalahan narkoba, permasalahan narkoba di fokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan dan strategi yang diberikan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional untuk masalah narkoba dengan adanya kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba (demain side), meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, dan meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan hasil survei BNNK Kediri sampai dengan bulan Juli Tahun 2018, narkoba di Kabupaten Kediri semakin meningkat di setiap tahunnya. Kecamatan Pare termasuk kecamatan yang memiliki potensi yang besar terpengaruh penyalahgunaan narkoba, dikarenakan banyaknya pemuda

yang dari luar kota bahkan dari luar pulau. Selama 2018, tindak pidana kasus narkotika di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan signifikan yaitu 320 kasus narkoba dengan 345 tersangka, terdiri dari pengguna atau pemakai maupun pengedar dan di antaranya terdapat laki-laki, wanita, dan anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data tersebut diperlukannya upaya-upaya yang strategis dalam penanganan kasus narkoba ini bukan dari aparat penegak hukum saja melainkan dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri di setiap bidang yakni bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Kediri sendiri untuk bersama-sama melakukan tindakan pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Kediri.

Dengan adanya lembaga rehabilitasi menangani kasus penyalahgunaan narkoba (BNN) tersebut, pemerintah telah menyediakan wadah atau tempat untuk para pecandu dan penyalahguna narkoba untuk mendapatkan hak mereka dalam membantu menyadarkan mereka dari bahayanya penggunaan narkoba tersebut. Dalam menangani penyalahgunaan narkoba maka pemerintah juga harus menyediakan wadah untuk membantu menyadarkan diri pengguna narkoba dengan menyediakan tempat rehabilitasi yang memadai dan memiliki fasilitas yang lengkap, sarana prasarana, dan serta tenaga ahli untuk merehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya merupakan pelayanan publik, namun pelayanan publik juga sering menimbulkan kesenjangan, dan kesenjangan yang timbul kerap kali dirasakan kepada yang membutuhkan pelayanan. Masyarakat atau seseorang pecandu yang menjadi korban dalam penyalahgunaan narkoba juga memiliki hak atas kesehatan mereka yang tidak stabil dikarenakan adanya penyalahgunaan narkoba, masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba seharusnya mendapatkan penanganan yang lebih serius dalam merehabilitasi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 54: Pecandu narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Setiap masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk melapor dan mendapatkan penanganan yang serius untuk dapat memulihkan kembali diri penyalahguna narkoba dengan merehabilitasi atau dengan tindakan hukum.

Sehubungan dengan adanya PP No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Pasal 54, namun kadang kala masyarakat enggan melaporkan diri mereka dikarenakan takut ditangkap, masyarakat belum punya budaya merehabilitasi secara sukarela karena stereotipe bahwa keluarga yang kena narkoba merupakan aib, Masyarakat berpendapat bahwa Pemenjaraan akan memberikan efek jera dan kalau di rehabilitasi masyarakat juga enggan jika pemerintah tidak melayani dengan baik, menyulitkan sistem administrasi birokrasi atau memandang rendah masyarakat pengguna narkoba. Pemerintahan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang memiliki badan khusus untuk menangani kasus narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN adalah sebuah lembaga non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba atau di singkat P4GN. Badan Narkotika Nasional di pimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui

Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum BNN sebagai lembaga non kementerian adalah Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang BNN.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi fokus penelitian adalah tentang: "Pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di kabupaten Kediri, sedangkan masalah penelitian dirumuskan, yaitu: "Bagaimana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di kabupaten Kediri?. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis rehabilitasi oleh BNNK Kediri dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Kediri; (2) mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan infrastruktur lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNNK Kediri; (3) mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan budaya atau kultur yang meliputi lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNNK Kediri; (4) mendeskripsikan dan menganalisis kendala BNNK Kediri dalam melakukan rehabilitasi pada penyalahgunaan narkotika.

Metode

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Moleong, 2005). Dengan penelitian deskriptif analisis kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih mendalam tentang pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka dapat pulih dan kembali ke masyarakat di Kabupaten Kediri. Latar penelitian adalah kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri yang berada di Jl. Raya Adan-adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan Pondok Rehabilitasi Al Ghozali Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Peneliti mendapat informasi yang mendalam tentang masalah dan mendapatkan solusi yang tepat dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan oleh peneliti.

Subjek penelitian ini adalah Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Kediri, Klien Rehabilitasi BNNK Kediri dan konselor atau pengurus Pondok Rehabilitasi Al-Ghozali Duwet Wates. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi, Sedangkan Teknik analisis data adalah Teknik analisis data kualitatif Miles dan Hurbenman dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, display data dan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan prinsip triangulasi, yaitu: (1) triangulasi data peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip BNNK Kediri yang peneliti dapatkan saat melakukan wawancara; (2) triangulasi pengamat yakni adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data; (3) triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini teori yang digunakan akan telihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut; dan (4) triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang terlibat didalam BNNK Kediri Sie rehabilitasi baik pegawai BNNK Kediri maupun pasien rehabilitasi.

Hasil

Tempat kedudukan

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri yang terletak di Jalan Raya Adan-Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Website BNNK Kediri untuk memperoleh informasi, yaitu www.kedirikab.bnn.go.id. Untuk masyarakat yang ingin berkomunikasi secara langsung BNNK Kediri menyediakan fasilitas telepon dengan nomor 035 4741 5444 atau 081 224 7566 333. Penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut dilakukan agar BNNK Kediri dapat melayani masyarakat dengan maksimal. BNNK Kediri dibentuk berdasarkan pasal 31 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, bahwa instansi vertikal BNN terdiri dari BNN Provinsi BNN Kabupaten/ Kota. BNNK Kediri didirikan tahun 2012 namun pada tahun tersebut BNNK Kediri dalam hubungannya menjalankan tugas dan kewenangannya BNNK Kediri baru menjalankannya pada tahun 2013.

Fungsi dan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional provinsi dan Badan Narkotika Nasional kabupaten/ kota yang selanjutnya disingkat perka BNN, pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah kabupaten. Dalam ayat 2 menyatakan bahwa "BNNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri, didukung oleh 10 tenaga PNS, 7 Tenaga Polri dan 18 tenaga Honorer, dimana tenaga ahli dibidang rehabilitasi dengan status PNS berjumlah 2 dan status honorer berjumlah 3 orang. Hampir semua tenaga rehabilitasi memiliki pengalaman. Visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri menjadi pedoman untuk tercapainya suatu tujuan yang membantu terbentuknya suatu strategi. Visinya adalah menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba. Sedangkan misinya adalah: (1) menyusun Kebijakan Nasional P4GN; (2) melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya; (3) mengkoordinasikan Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; (4) memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri

Untuk menciptakan spesialisasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan menempatkan SDM sesuai dengan kemampuannya, maka adanya struktur organisasi di BNNK Kediri yang bertujuan untuk pembagian kerja agar terciptanya tanggung jawab yang akan berpengaruh kepada organisasi. Struktur organisasi di BNNK Kediri berdasarkan Perka BNN Pasal 25,

Sarana dan Prasarana

BNN Kabupaten Kediri yang berdiri pada Tahun 2012 sampai saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri (sekarang menggunakan gedung eks SDN Adan-adan 1 milik Pemerintah Kabupaten Kediri dengan status pinjam pakai). Dengan keterbatasan sarana dan prasarana dapat dilihat bahwa BNNK Kediri tidak mempunyai alat untuk melakukan rehabilitasi. Oleh karena itu BNNK Kediri menggandeng beberapa lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat untuk program rehabilitasi. Untuk instansi pemerintah sendiri BNNK Kediri telah bekerja sama dengan Puskesmas Gurah dan Puskesmas Sidomulyo Wates, sedangkan untuk komponen masyarakat BNNK Kediri bekerja sama dengan Pondok Rehabilitasi Al-Ghozali Wates, Klinik Kusuma Husada Bedali- Ngancar dan Klinik Surya Prima Husada Kunjang.

Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Kantor BNN Kabupaten Kediri

Pelayanan rehabilitasi di BNN Kabupaten Kediri ini diemban oleh seksi rehabilitasi, apabila masyarakat menemui seorang pecandu narkoba ini dapat dibawa ke BNN Kabupaten Kediri, oleh BNN Kabupaten Kediri di assessment, setelah kami assasment itu mengetahui kebutuhan korban penyalahgunaan narkoba itu, maka nanti akan kami arahkan kepada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat di Rehab rawat jalan di pondok pesantren yg namanya lembaga rehabilitasi komponen masyarakat atau juga kami rujuk ke lembaga rehabilitasi instansi pemerintah Puskesmas atau juga di klinik. Layanan rehab di BNN bekerja sama dengan LRKM dan LRIP yang ber PKS dengan BNN RI di Jakarta, LRKM nya itu ada tiga, LRIP nya ada dua, yang LRKM itu dengahn nama klinik Surya Prima Husada Kunjang, Klinik Kusuma Husada Bedali Ngancar, kemudian Pondok Pesantren Al Ghozali di Duwet Wates Kediri, LRIP, LRIP dan instansi pemerintah ada di Puskesmas Gurah dan di Puskesmas Sidomulyo di Wates. Pelayanan rehabilitasi di BNN, dengan bekerja sama dengan LRKM atau LRIP, karena belum mempunyai klinik yang mempunyai izin dari instansi pusat. Penyaluran para pecandu atau penyalahguna narkoba kepada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan pemerintah, dan macam rehabilitasi ada dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. BNN Kabupaten Kediri kita bekerja sama dengan LRKM atau LRIP dikarenakan di BNN Kabupaten Kediri belum mempunyai klinik, untuk tempatnya di Kediri ada LRIP dan LRKM, LRIP nya di Puskesmas Gurah dan Puskesmas Sidomulyo, kalau LRKM nya ada di pondok pesantren Al Ghozali Wates , Klinik surya prima Husada di Kunjang dan Klinik Kusuma Husada di Ngancar.

Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Pondok Pesantren Al Ghozali Duwet Wates Kediri

Pelayanan rehabilitasi di pondok pesantren Al Ghozali Wates ini salah satunya untuk memulihkan bukan untuk menyembuhkan, karena para pecandu narkoba atau narkotika itu tidak dapat disembuhkan karena sistem saraf otak sudah tidak baik. Pelayanan rehabilitasi di pondok kita hampir sama seperti di BNN Kabupaten kediri, Prosedur penerimaan awal pun sama, hanya jika di BNN Kabutnen kediri belum punya gedung sendiri, maka dari itu BNN Kabupaten Kediri belum dapat merehab, hanya dapat bekerja sama, merehabilitasi para pecandu narkotika.

Rehabilitasi

Rehabilitasi itu terapi untuk menolong para korban penyalahgunaan narkoba/narkotika yang sangat ketergantungan agar dapat pulih, korban penyalahgunaan narkoba hanya dapat pulih dan tidak dapat sembuh, karena sistem saraf otak tidak baik, maka dari itu tidak dapat disembuhkan tapi dapat dipulihkan dan dapat beraktifitas lagi ke masyarakat.

Jenis- jenis Rehabilitasi

Jenis rehab itu ada rawat jalan ada rawat inap. BNN Kabupaten Kediri memiliki program rawat jalan, rawat jalan itu ada rawat jalan instansi pemerintah di Puskesmas Gurah, kemudian rawat jalan medis, di Klinik Kusuma Husada yang ada di Bedali Ngancar, dan klinik surya prima Husada yang ada di Kunjang. Puskesmas telah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Kediri, dan di pondok pesantren Al Ghazali Duwet Wates. Di BNNK Kediri ada 2 lembaga yaitu lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM) dan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah (LRIP), dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM) ada 2 jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM) medis, BNNK Kediri telah bekerja sama dengan Klinik Surya Prima Husada, Klinik Kusuma Husada dan Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center (RSK HMC) Sengkaling Malang. Sedangkan sosialnya BNNK Kediri telah bekerja sama dengan Ponpes Al Ghazali wates. Sedangkan untuk lembaga rehabilitasi instansi pemerintah (LRIP) BNNK Kediri bermitra dengan Puskesmas Gurah.

Komponen Rehabilitasi

Dalam melaksanakan program rehabilitasi, terdapat alur dan jenis layanan yang harus dilakukan secara berkelanjutan yang di harapkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan pulih kembali. Rehabilitasi berkelanjutan merupakan serangkaian proses yang mencakup rehabilitasi medis, sosial dan rehabilitasi yang di lakukan secara kontinyu dalam satu kesatuan layanan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari proses penerimaan awal hingga program rawat lanjut. Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Kediri, penulis dapat menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang komponen pendukung agar rehabilitasi yang berada di BNNK Kediri. Dengan alur program yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Penerimaan awal atau assessment

Prosedurnya ketika ada masyarakat yang sukarela datang ke BNN Kabupaten Kediri, sukarela si pecandu datang ke BNN atau diantar oleh keluarganya namanya voluntary. Voluntary itu sukarela datang ke BNN Kabupaten Kediri atau compulsory mereka itu dipaksa. Kegiatan assesment dulu untuk menggali informasi lebih jauh lebih mendalam tentang keberadaan si klien pecandu narkoba ini, kemudian dapat menentukan terapinya, mana yang lebih tepat rawat jalan atau lebih tepat ini kami rujuk ke lembaga rehabilitasi

misalnya di rumah sakit jiwa di malang atau di rumah sakit khusus Hayunanto Medical Center (RSK-HMC) di batu agar mereka menjalani rehabilitasi rawat inap. Prosedur penerimaan pasien ada dua, yang pertama klien rehab datang ke kantor BNN, di BNN klien akan di asesmen awal Kemudian dari asesmen itu akan diperoleh ke mana seharusnya klien itu dirujuk Apakah klien ini membutuhkan rawat jalan atau rawat inap kalau rawat jalan dan dapat menyalurkan ke LRKM dan LRIP yang bekerja sama dengan BNN Kabupaten Kediri yaitu lembaga rehabilitasi instansi pemerintah nya di Puskesmas Gurah dan Puskesmas Sidomulyo Wates, sedangkan LRKM nya kita punya tiga yang pertama adalah Pondok Pesantren Al Ghazali duwet Wates, yang kedua adalah klinik Pratama surya prima Husada di Kunjang dan yang ketiga adalah Klinik Kusuma Husada di Ngancar terus prosedur yang kedua yaitu pasien dapat langsung datang ke LRKM atau LRIP yang telah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Kediri. Prosedur penerimaan awal di BNN Kabupaten Kediri pasien datang dengan membawa identitas diri dan identitas penanggungjawab berupa KTP atau KK atau identitas lainnya, dapat datang sendiri atau diantar keluarga atau kerabat atau yang lainnya yang sekarang secara sukarela melaporkan diri nanti akan menjalani proses asesmen atau semacam wawancara untuk menentukan apakah dia itu benar-benar ketergantungan narkotika atau tidak dan harus menjalani rawat jalan atau rawat inap kalau memerlukan rehabilitasi. Assesmen baik di BNNK Kediri maupun di Pondok Pesantren Al-Ghazali Wates apabila ada klien dalam tahap penggunaan sedang atau ringan maka klien akan di rujuk ke Pondok Pesantren Al-Ghazali Wates. Sedangkan untuk klien tingkat penggunaan berat klien akan di rujuk Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center (RSK HMC) Sengkaling Malang.

Penyusunan rencana terapi

Setelah ada rujuk, diberi surat pengantar dari BNN Kabupaten Kediri, mereka diantar ke tempat rehabilitasi, baik di komponen Masyarakat maupun di instansi pemerintah. Salah satu program untuk menyembuhkan para pecandu ini agar mereka dapat dan tidak kecanduan lagi dan dapat pulih ini ada beberapa proses, memang ada harus menjalani konseling selama 8 kali, 8 kali ini biasanya di jadwal oleh lembaga rehab itu satu minggu satu kali harus menjalani konseling, konseling itu 1 sampai 8 kali konseling, memang konseling itu teorinya banyak. Jadi konseling yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ini ada beberapa teori nanti pertama berkaitan dengan riwayat dia memakai, kemudian konseling yang kedua berkaitan dengan keberadaan lingkungan dan keluarga, sehingga selama mereka menjalani konseling ini akan mendapatkan berbagai terapi, berbagai motivasi sehingga mereka dapat meninggalkan kebiasaan untuk mengkonsumsi narkoba, itu dapat ditingkatkan. Rencana terapi ini digunakan apabila klien telah melakukan asesmen dan dari asesmen tersebut di dapatkan bahwa klien harus adanya terapi dalam rehabilitasi. Di dalam BNNK Kediri dan Ponpes Al Gozali sendiri ada 8 kali pertemuan di lakukan di Ponpes Al-Ghazali Duwet Wates.

Program detoksifikasi

Untuk detoksifikasi klien yang direhab di pondok pesantren Al Ghazali Wates ini menggunakan air kelapa muda, air kelapa hijau yang muda dan obat-obatan herbal yang

kami buat sendiri dan bahannya itu dari akar-akaran tumbuhan, untuk setiap hari para korban pecandu narkoba atau narkotika ini setiap hari kita mandi kan dengan air yang diiringi dengan doa dan dipijat di area kepala. Detoksifikasi klien yang memilih rehabilitasi sosial di Pondok Rehabilitasi Al-Ghozali Wates menggunakan air kelapa muda atau dengan kapsul herbal yang dibuat sendiri bahanya dari akar-akaran dan dimandikan dengan kepala dipijat yang diiringi dengan do'a-do'a.

Pencegahan kekambuhan (relaps)

Untuk pencegahan kekambuhan kita melakukan konseling satu minggu sekali sebanyak 8 kali pertemuan dimana untuk ke klien kita motivasi agar tidak menggunakan narkotika lagi dan kita setiap pertemuan kita ajak mereka untuk salat bersama, sebelum salat Sunnah bersama si pecandu dimandikan dulu dengan air yang diiringi dengan doa seperti di ruqyah dengan menanamkan nilai-nilai religi agar mereka tidak kembali lagi ke kehidupan yang suram dan menuju ke masyarakat. Pencegahan kekambuhan (ralaps) di Ponpes Al-Ghozali Duwet Wates klien akan melakukan konseling setiap 1 minggu sekali, gunanya untuk memotivasi klien agar tidak menggunakan narkotika lagi. Untuk mencegah relaps yang dilakukan oleh Pondok Rehabilitasi Al-Ghozali Wates adalah dengan menanamkan nilai-nilai religi seperti rukyah, mandi malam dengan mata air asli yang diiringi dengan do'a-do'a, kegiatan tersebut wajib diikuti klien yang rehab di Pondok Rehabilitasi Al-Ghozali Wates.

Keterlibatan keluarga

Keluarga sangat penting dalam terapi baik klien yang rehab medis maupun sosial. Klien tidak mungkin pulih sendiri tanpa dukungan keluarga dan orang-orang lain. Oleh karena dukungan keluarga dapat memotivasi klien dalam melakukan rehabilitasi. Dukungan keluarga terhadap klien merupakan formulasi yang sangat baik dikarenakan dengan mendapatkannya dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada klien untuk membantu proses pemulihan.

Berikut beberapa faktor penghambat rehabilitasi yang berada di BNNK Kediri.

Faktor Intern

Faktor penghambat yang berasal dari dalam diri klien seperti klien yang tidak mau terbuka dan narkotika itu sangat berbahaya, dalam hal ini BNNK Kediri memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan beberapa dampak akibat dari penyalahgunaan narkotika. Sedangkan untuk klien yang takut apabila dijadikan sasaran operasi dari pihak BNNK Kediri sendiri telah mengimbau apabila ada seorang pecandu narkotika yang datang sendiri atau diantar walinya maka pecandu tersebut tidak akan dikenai hukum pidana kecuali pecandu tersebut adalah pengedar. Selanjutnya untuk klien hasil operasi dari BNNK Kediri atau dari kepolisian apabila klien di geledah oleh polisi dan membawa barang bukti narkotika maka klien akan di asesmen terpadu oleh kepolisian, kesaksian dan dari BNN sendiri. Dan apabila dari tim asesmen terpadu itu menyimpulkan apakah klien termasuk

pengguna murni atau pengguna merangkap sebagai pengedar atau klien pengguna merangkap sebagai bandar. Kalau klien pengguna murni berarti rekomendasi dari tim asesmen itu rehabilitasi, tapi kalau klien pengedar atau menjual atau sebagai bandar maka di proses hukum dulu dilimpahkan kejaksaan sampai putusan hukum keluar, kalau klien tidak terbukti bukan pengedar atau bandar maka di rehab, tetapi kalau klien merangkap sebagai bandar atau pengedar maka klien terkena hukuman dan pasal yang menentukan kejaksaan.

Faktor Ekstern

Faktor yang berasal dari luar diri klien seperti klien yang bekerja atau sekolah kalau tempat rehab biasanya tenaga yang terbatas, jarak rumah klien dengan tempat rehab terlalu jauh, dokternya terbatas perawatnya terbatas, terus dukungan keluarga juga itu sangat di butuhkan selain itu lingkungan tempat dia tinggal yang tidak mendukung.

Tujuan Rehabilitasi

Tujuan kami para pecandu narkoba ini dapat pulih, pulih disini kami punya empat kriteria yaitu pulih produktif, pulih tetapi tidak produktif, tidak pulih atau tidak produktif, atau mungkin tidak pulih dan tidak produktif, masuknya tidak pulih tidak sembuh dan tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak pulih atau juga produktif. Tujuan kegiatan rehabilitasi merangkul pecandu dan pengguna narkoba atau korban penyalahguna untuk dapat pulih kembali ke lingkungan sosial dan produktif. Tujuan rehabilitasi untuk memulihkan para penyalahgunaan atau pecandu narkoba bukan bandar, karena para penyalahguna dan pecandu itu tidak dapat sembuh, yang dapat hanya pulih dan rehabilitasi adalah salah satu cara untuk membuat individu itu atau klien itu menjadi pulih kembali. Tujuan rehab pada umumnya membuat para pecandu narkotika atau narkoba menjadi pulih dan tidak ketergantungan narkotika lagi agar mereka dapat kembali ke tengah masyarakat dan dapat dipercaya lagi.

Kendala Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Kendala yang dihadapi memang amanat undang-undang nomor 35 Tahun 2009, bahwa pecandu narkotika atau pecandu narkoba itu harus menjalani rehabilitasi, kendalanya karena selama ini masyarakat itu menutup diri keluarga atau Bapak Ibu yang memiliki anak sebagai pecandu ini biasanya dirahasiakan, sehingga mereka tidak terbuka dan tidak mau datang ke BNN bahkan ketika kami itu menanyakan ditutup-tutupi informasi berkaitan dengan anak-anaknya itu sebagai pecandu, kemudian mindset masyarakat mereka beranggapan bahwa pecandu itu harus dipenjara, jadi pemenjaraan itu sebetulnya bukan solusi mengembalikan mereka agar hidup sehat, pecandu ketika dia harus kita penjarakan, harus dihukum itu ketika mereka menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan itu malah mereka itu bertemu dengan berbagai masyarakat yang disitu sudah dapat tukar pengalaman ketika dipenjara, mereka ketemu dengan sesama pecandu sehingga mereka saling tukar pengalaman, sehingga keluar itu kebanyakan mereka bukan sembuh tetapi malah mereka lebih pengalaman bahkan ketika masuk itu hanya pengkonsumsi, tapi ketika keluar sebagai pengedar, jadi kendalanya kami ini pertama

masyarakat menutup diri karena mindset masyarakat bahwa pecandu itu harus kita sebagai aib, aib keluarga yang harus di rahasiakan, kemudian tanggapan masyarakat bahwa pecandu itu harus dipenjara, padahal penenjaraan itu justru menambah parah para pecandu itu. Jika untuk kendala proses rehabilitasi itu kebanyakan klien itu tidak lengkap mengikuti program rehabilitasi kadang tidak mau kembali ke tempat Rehab misalnya ada klien ke Puskesmas murah harusnya 8 kali pertemuan tapi kliennya hanya datang 4 kali atau bahkan malah cuma dua kali jadi tergantung dirinya sendiri klien juga niatnya untuk pulih itu Sebesar apa kalau misalnya niatnya untuk pulih besar seharusnya dia dapat 8 kali pertemuan itu tapi kadang klien itu malas atau tergoda faktor-faktor lain atau mungkin jaraknya juga yang jauh dengan tempat Rehab jadi tidak lengkap tidak sampai 8 kali atau tidak sampai tuntas proses rehabnya, terkadang pengguna pengguna narkoba itu terkadang masih ada rasa takut atau melihat BNN atau itu takut untuk melapor diri Soalnya takutnya disangkut pautkan dengan proses hukum atau polisi, takut dipenjara padahal untuk pecandu atau pengguna itu akan kita bantu untuk di rehabilitasi dipulihkan karena pecandu itu perlu diselamatkan bukan malah dipenjara.

Kendala proses rehabilitasi yang pertama adalah jika pasien ini tidak dapat menyelesaikan program rehabilitasi rawat jalan karena banyak faktor, mungkin dari pasien sendiri yang belum berniat untuk sembuh atau yang kedua jaraknya yang harus ditempuh cukup jauh antara tempat tinggal pasien dengan tempat rehabilitasi, yang ketiga mungkin dukungan dari keluarga yang kurang dapat menyebabkan pasien tidak dapat menyelesaikan program rehabilitasi rawat jalan dan pasien tidak dipungut biaya selama proses rehabilitasi di LRKM maupun LRIP. Jika kendalanya terkadang pasien atau klien yang ingin datang itu merasa takut mungkin karena takut nanti dipidana atau dilaporkan ke polisi, kendalanya kalau dari proses rehab di tempat itu klien merasa bosan dan tidak selesai menjalani proses rehab, kalau minimal 8 kali sampai 12 kali mungkin hanya 4 kali bahkan 2 kali.

Pembahasan

Fungsi dan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri secara hierarkhi di bawah kewenangan dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi. Hampir semua tenaga rehabilitasi memiliki pengalaman dalam melaksanakan pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dukungan sumber daya manusia untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri, didukung oleh 10 tenaga PNS, 7 Tenaga Polri dan 18 tenaga Honorer, dimana tenaga ahli dibidang rehabilitasi dengan status PNS berjumlah 2 dan status honorer berjumlah 3 orang. Hampir semua tenaga rehabilitasi memiliki pengalaman. Visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri telah menjadi pedoman untuk tercapainya suatu tujuan yang membantu terbentuknya suatu strategi. Adapun visinya adalah menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba. Misi: (1) menyusun Kebijakan Nasional P4GN; (2) melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya; (3) mengkoordinasikan Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; (4) memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri tersusun dan seusai dengan spesialisasi yang tepat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Struktur organisasi atau instansi selalu berkembang dan bersifat baru, karena sering bergantinya waktu menjadikan struktur organisasi atau instansi mengalami perubahan, baik dalam hal rotasi pegawai atau pindah (mutasi). Adanya penilaian dari tiap pegawai juga mempu mendorong pegawai untuk memperbaiki kinerjanya. Sarana dan Prasarana BNN Kabupaten Kediri yang berdiri pada Tahun 2012 sampai saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri (sekarang menggunakan gedung eks SDN Adan-adan 1 milik Pemerintah Kabupaten Kediri dengan status pinjam pakai). Dengan keterbatasan sarana dan prasarana dapat dilihat bahwa BNNK Kediri tidak mempunyai alat untuk melakukan rehabilitasi. Oleh karena itu BNNK Kediri menggandeng beberapa lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat untuk program rehabilitasi. Untuk instansi pemerintah sendiri BNNK Kediri telah bekerja sama dengan Puskesmas Gurah dan Puskesmas Sidomulyo Wates, sedangkan untuk komponen masyarakat BNNK Kediri bekerja sama dengan Pondok Rehabilitasi Al-Ghozali Wates, Klinik Kusuma Husada Bedali- Ngancar dan Klinik Surya Prima Husada Kunjang. Fakta di atas menunjukkan bahwa suatu lembaga seperti tidak dapat melakukan sendiri, tetapi harus berkolaborasi dan kerja sama dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Kantor BNN Kabupaten Kediri, dengan ketergantungan narkotika atau ketergantungan narkoba kepada klinik atau ke Puskesmas yang sudah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Kediri.

Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Pondok Pesantren Al Ghazali Duwet Wates Kediri. Pelayanan rehabilitasi di pondok pesantren Al Ghazali Wates ini salah satunya untuk memulihkan bukan untuk menyembuhkan, karena para pecandu narkoba atau narkotika itu tidak dapat disembuhkan karena sistem saraf otak sudah rusak, jadi di sini hanya dapat memulihkan saja untuk memulihkan para pecandu tidak semudah yang kita bayangkan, karena dengan kesabaran dan keikhlasan nanti lama-kelamaan akan sembuh, dan agar dapat kembali ke masyarakat, dengan telaten kita akan memulihkan para pecandu di sini pecandu kita obati dengan ramuan tradisional seperti akar-akaran dan nanti dimandikan dengan air doa dan nanti akan di siram ke bagian kepala dan dipijat-pijat dan diiringi dengan doa. Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi adalah pengobatan atau terapi dimana tujuannya untuk menolong para pengguna narkoba agar dapat pulih dan dapat kembali beraktifitas di tengah masyarakat. Rehabilitasi adalah terapi untuk menolong para korban penyalahguna narkoba/ narkotika yang sudah sangat ketergantungan agar dapat pulih, korban penyalahguna narkoba hanya dapat pulih dan tidak dapat sembuh, karena sistem saraf otak sudah rusak, maka dari itu tidak dapat disembuhkan tapi dapat dipulihkan dan diharapkan dapat beraktifitas lagi ke masyarakat

Di BNNK Kediri ada 2 lembaga yaitu lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM) dan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah (LRIP), dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM) ada 2 jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk rehabilitasi komponen masyarakat (LRKM) medis, BNNK Kediri telah bekerja sama dengan Klinik Surya Prima Husada, Klinik Kusuma Husada dan Rumah

Sakit Khusus Hayunanto Medical Center (RSK HMC) Sengkaling Malang, sedangkan sosialnya BNNK Kediri telah bekerja sama dengan Ponpes Al Ghozali wates. Sedangkan untuk lembaga rehabilitasi instansi pemerintah (LRIP) BNNK Kediri bermitra dengan Puskesmas Gurah. Dalam melaksanakan program rehabilitasi, terdapat alur dan jenis layanan yang harus dilakukan secara berkelanjutan yang di harapkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan pulih kembali. Rehabilitasi berkelanjutan merupakan serangkaian proses yang mencakup rehabilitasi medis, sosial dan rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari proses penerimaan awal hingga program rawat lanjut. Hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Kediri, penulis dapat menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang komponen pendukung agar rehabilitasi yang berada di BNNK Kediri. Dengan alur program yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Penerimaan awal atau assessment

Jadi prosedurnya ketika ada masyarakat yang sukarela datang ke BNN Kabupaten Kediri, sukarela ini jadi sipecandu datang ke BNN atau diantar oleh keluarganya namanya voluntary, voluntary itu sukarela datang ke BNN Kabupaten Kediri atau compulsory mereka itu dipaksa misalnya ketika kami melakukan razia, melakukan pengawasan menemukan pecandu mana ini kami assasment, ini prosedurnya, Jadi kami assasment dulu dengan assasment ini kami akan menggali informasi lebih jauh lebih mendalam tentang keberadaan si klien pecandu narkoba ini setelah kami assasment kami dapat menentukan terapinya, mana yang lebih tepat rawat jalan atau lebih tepat ini kami rujuk ke lembaga rehabilitasi misalnya di rumah sakit jiwa di malang atau di rumah sakit khusus Hayunanto Medical Center (RSK-HMC) di batu agar mereka menjalani rehabilitasi rawat inap, jadi prosedurnya harus kami assasment dulu oleh psikolog BNN Kabupaten Kediri.

Untuk prosedur penerimaan klien dan jenis klien ada dua voluntary dan compulsory kalau untuk voluntary itu sukarela, sukarela itu biasanya dapat ke BNN sendiri datang, datang ke BNN terus kita Salurkan, kita rujuk ke LRKM atau LRIP tadi kalau yang kalau yang compulsory biasanya dari tangkapan Polres atau melalui asesmen terpadu kita ada asesmen terpadu juga itu biasanya terkait masalah hukum, pasiennya lebih kayak terpaksa gitu jadi kayak dipaksa namanya compulsory, kalau yang voluntary tadi selain dia datang ke BNN Kabupaten Kediri juga dapat datang ke LR KM atau LRIP langsung ke sana tanpa melalui kita tapi kalau misalnya mau datang ke BNN kita antarkan kita bantu untuk ke LR KM dan LRIP nya, kalau untuk persyaratannya Biasanya kita membutuhkan KTP atau identitas klien atau SIM atau KK kemudian nanti pasien dan orang tua mengisi formulir di BNN isinya itu orang tua wali menyerahkan kepada kita untuk setuju direhabilitasi kliennya atau persetujuan orang tua atau wali.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan mengenai assesmen baik di BNNK Kediri maupun di Pondok Pesantren Al-Ghozali Wates apabila ada klien dalam tahap penggunaan sedang atau ringan maka klien akan di rujuk ke Pondok Pesantren Al-Ghozali Wates. Sedangkan untuk klien tingkat penggunaan berat klien akan di rujuk Rumah Sakit

Khusus Hayunanto Medical Center (RSK HMC) Sengkaling Malang. Rencana terapi ini di gunakan apabila klien telah melakukan asesmen dan dari asesmen tersebut di dapatkan bahwa klien harus adanya terapi dalam rehabilitasi. Program detoksifikasi untuk detoksifikasi klien yang direhab di pondok pesantren Al Ghozali Wates ini menggunakan air kelapa muda, air kelapa hijau yang muda dan obat-obatan herbal yang kami buat sendiri dan bahannya itu dari akar-akaran tumbuhan, untuk setiap hari para korban pecandu narkoba atau narkotika ini setiap hari kita mandi kan dengan air yang diiringi dengan doa dan dipijat di area kepala. Untuk detoksifikasi klien yang memilih rehabilitasi sosial di Pondok Rehabilitasi Al-Ghozali Wates menggunakan air kelapa muda atau dengan kapsul herbal yang dibuat sendiri bahanya dari akar-akaran dan dimandikan dengan kepala dipijat yang diiringi dengan do'a-do'a.

Untuk pencegahan kekambuhan kita melakukan konseling ke klien kita motivasi agar tidak menggunakan narkotika lagi dan kita setiap pertemuan kita ajak mereka untuk salat bersama, sebelum salat Sunnah bersama si pecandu dimandikan dulu dengan air yang diiringi dengan doa seperti di ruqyah dengan menanamkan nilai-nilai religi agar mereka tidak kembali lagi ke kehidupan yang suram dan menuju ke masyarakat. Untuk pencegahan kekambuhan (ralaps) di Ponpes Al-Ghozali Duwet Wates klien akan melakukan konseling setiap 1 minggu sekali, gunanya untuk memotivasi klien agar tidak menggunakan narkotika lagi. Untuk mencegah relaps yang dilakukan oleh Pondok Rehabilitasi Al-Ghozali Wates adalah dengan menanamkan nilai-nilai religi seperti rukyah, mandi malam dengan mata air asli yang diiringi dengan do'a-do'a, kegiatan tersebut wajib diikuti klien yang rehab di Pondok Rehabilitasi Al-Ghozali Wates.

Keluarga sangat penting dalam terapi baik klien yang rehab medis maupun sosial. Klien tidak mungkin pulih sendiri tanpa dukungan keluarga dan orang-orang lain. Karena dari dukungan keluarga dapat memotivasi klien dalam melakukan rehabilitasi. Dukungan keluarga terhadap klien merupakan formulasi yang sangat baik dikarenakan dengan mendapatkannya dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada klien untuk membantu proses pemulihan. Faktor Penghambat dan Pendorong Proses Rehabilitasi, adalah faktor Intern, yaitu dari dalam diri klien. BNNK Kediri memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan beberapa dampak akibat dari penyalahgunaan narkotika. Sedangkan untuk klien yang takut apabila dijadikan sasaran operasi dari pihak BNNK Kediri sendiri telah mengimbau apabila ada seorang pecandu narkotika yang datang sendiri atau diantar walinya maka pecandu tersebut tidak akan dikenai hukum pidana kecuali pecandu tersebut adalah pengedar. Di samping faktor internal, ada juga

Faktor yang berasal dari luar diri klien seperti klien yang bekerja atau sekolah kalau tempat rehab biasanya tenaga yang terbatas, jarak rumah klien dengan tempat rehab terlalu jauh, dokternya terbatas perawatnya terbatas, terus dukungan keluarga juga itu sangat dibutuhkan selain itu lingkungan tempat dia tinggal yang tidak mendukung. Tujuan Rehabilitasi empat kriteria yaitu pulih produktif, pulih tetapi tidak produktif, tidak pulih atau tidak produktif, atau mungkin tidak pulih dan tidak produktif, masuknya tidak pulih tidak sembuh dan tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak pulih atau juga produktif. Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa rehabiliasi merupakan salah satu upaya

pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Kendala Rehabilitasi Pecandu Narkotika bahwa masyarakat itu menutup diri keluarga atau Bapak Ibu yang memiliki anak sebagai pecandu ini biasanya dirahasiakan, sehingga mereka tidak Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan masyarakat berpendapat bahwa pecandu/korban penyalahgunaan narkoba harus dipenjara, dan korban penyalahgunaan merupakan aib bagi keluarga, klien tidak mengikuti atau menuntaskan menjalankan proses rehab dikarenakan jarak rumah klien dengan panti rehabilitasi terlalu jauh.

Kesimpulan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri belum dapat mandiri dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri hanya melayani program rehabilitasi rawat jalan dikarenakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri belum mempunyai gedung sendiri, sehingga harus bekerja sama dengan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM). Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri menyesuaikan klien dengan tingkatannya masing-masing. Apabila klien dalam tingkatan penggunaan narkotika kelas sedang atau ringan maka klien rehabilitasi dapat memilih layanan regabilitasi medis rawat jalan atau layanan rehabilitasi sosial, tetapi apabila klien dalam tingkatan penggunaan narkotika kelas berat maka klien dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Hayunanto Medical Center (RSK HMC) Malang. Untuk jenis rehabilitasi rawat jalan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri telah bekerja sama dengan beberapa lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat dan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah. Faktor utama baik pendukung maupun penghambat adalah faktor yang berasal dari dalam diri klien seperti motivasi klien ingin sembuh dan klien memiliki niatan yang kuat bahwa klien benar-benar ingin pulih. Hambatan yang dihadapi baik internal maupun eksternal mempengaruhi tingkat keberhasilan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

- Sutanto, Agus. 2007. *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, Balai Penerbit BNP Jawa Timur, Surabaya.
- Abidin, Z.S. 2010. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Badan Narkotika Nasional. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Yogyakarta: UII Press.
- Nurcholis. Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Rasyid, M.Riyaas. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepeminpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Rahmayanti, Nina. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sinambela. Lijan Poltak. 2006, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Impelentasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara
Tjiptono, Fandy, 1997. Strategi Pemasaran, Edisi 1. Yogyakarta: Andi.

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Badan Narkotika Nasional*

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 *Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor*

Pecandu Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*.

Undang-undang Nomor 63 *Tentang Pelayanan Publik*.

Website

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri (online), <http://www.bnkkab-kediri.net/visi.html> diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 17.12

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri (online), <http://www.bnkkab-kediri.net/tupoksi.html> diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 17.20

<http://kbbi.web.id/narkotika>.

<http://kbbi.web.id/penyalahguna>.

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi>

EFEKTIVITAS PROGRAM SURABAYA SMART CITY (SSC) DALAM MEWUJUDKAN SMART ENVIRONMENT

Eki Satria Iqbal^{1*}, Deasy Arieffiani²

^{1,2} Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: ekisatria.esi@gmail.com

Abstrak

Surabaya Smart City (SSC) merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. SSC sebenarnya merupakan kombinasi dari kompetisi berbasis lingkungan, Surabaya Green and Clean (SGC) dan Freedom from Waste (MDS). Tujuan dari program Surabaya Smart City adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan mengembangkan desa-desa yang berpotensi menjadi desa wisata. Baik dari segi kebersihan, produk unggulan, kampung aman, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program Surabaya Smart City dalam mewujudkan smart environment di Desa SEHATI Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota Surabaya. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui efektivitas program Surabaya Smart City dalam mewujudkan smart environment di Desa SEHATI Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno dengan variabel pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan program dan perubahan nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Surabaya Smart City di Desa SEHATI Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota Surabaya cukup efektif karena dari kelima variabel efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno sudah berjalan dengan baik dan efektif. Faktor pendorong pelaksanaan program Surabaya Smart City di Desa SEHATI Desa Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota Surabaya adalah peran dukungan pemerintah dan masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah pемbiayaan dan teknologi.

Kata Kunci: Surabaya Smart City, Effectiveness, Surabaya City

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dalam segala aspek. Sesuai dengan agenda lanjutan yang diadakan oleh PBB setelah MDGs yaitu SDGs The Sustainable Development Goals merupakan agenda pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi dan telah di sepakati oleh negara anggota dalam pengimplementasian secara terpadu pada setiap negara. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut berpartisipasi dalam penerapan program SDGs. Keseriusan Indonesia dalam hal ini telah disepakati dan difasilitasi oleh Bappenas dalam mengeluarkan Kovergensi Agenda Pembangunan berkelanjutan: Nawa Cita, RPJMN, dan SDGs pada tahun 2015. Pembangunan berkelanjutan ini tidak bisa dipisahkan dari konsep kota cerdas atau Smart City. Pembangunan berkelanjutan ini tidak bisa dipisahkan dari konsep kota cerdas atau Smart City. Konsep kota cerdas ini sebagai upaya penerapan dari pembangunan berkelanjutan. Kota cerdas merupakan konsep kota menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, pemantauan dan pengendalian berbagai sumber daya yang ada di dalam kota secara efektif dan efisien dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada warga kota (Alawadhi et al, 2012). Kota

Surabaya adalah salah satu kota dalam pengembangan kotanya menuju Smart City. Surabaya Smart City (SSC) merupakan pembaruan program dari Surabaya Green and Clean (SGC), Pada tahun 2005 wali kota Surabaya mengadakan program Surabaya Green and Clean yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertahanan Kota Surabaya untuk mengedukasi dan apresiasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan tahun 2019 Wali kota Surabaya mengubah menjadi Surabaya Smart City.

Kampung SEHATI (Sehat, Elok, Hijau, Aman, Taat dan Iman) berada di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sebagai salah satu peserta program Smart City di Kota Surabaya memiliki program Urban Farming atau pemanfaatan lahan sempit untuk bercocok tanam, tanaman yang di tanam pun berupa tanaman Toga, sayur-mayur dan tanaman hias. Untuk potnya sendiri warga menggunakan botol plastik bekas yang di daur ulang dan Kampung SEHATI juga menerapkan Vertical Garden atau yang biasa disebut taman/ kebun yang tersusun secara Vertical. Melalui pelaksanaan program Surabaya Smart City, setiap kampung diharapkan dampak merasakan secara langsung berupa kampung yang bersih aman nyaman dan mempunyai produk unggulan. Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Keefektifan suatu program bisa terlihat dari tepatnya sasaran dan perubahan nyata yang dihasilkan (Sutrisno,2007). Oleh karena itu penelitian ini dengan judul “Efektivitas Program Surabaya Smart City (SSC) Dalam Mewujudkan Smart Environment (Study pada Kampung SEHATI Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Tembok Dukuh RT 03 RW 04 Kota Surabaya)” dilakukan untuk mengetahui efektivitas program Smart City di Kampung SEHATI.

Metode

Dalam penelitian ini digunakan teori Sutrisno (2007) untuk mengukur efektivitas program Surabaya Smart City di Kampung SEHATI. Metode penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Berikut ini merupakan kerangka konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:



Hasil

Efektivitas program Surabaya Smart City hanya akan didapatkan apabila memenuhi indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan program Surabaya Smart City di Kampung SEHATI dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007) mengenai efektivitas program Surabaya Smart City di Kampung SEHATI yaitu:

Pemahaman Program

Warga Kampung SEHATI cukup memahami mengenai program Surabaya Smart City yang mana mereka harus menjaga lingkungan. Warga Kampung SEHATI melakukan kegiatan penghijauan serta melakukan pengembangan ketahanan pangan keluarga berupa UMK Mandiri, penghasil sirup markisa, penyewaan baju dari hasil pengelolaan sampah plastik, aquarium yang berisi ikan gurami dan ikan lele, dan setiap rumah melakukan pengaplikasian tanaman pangan hidroponik dengan lahan terbatas yang dipasarkan secara online maupun dikomsumsi sendiri. Dalam pelaksanaan suatu program proses komunikasi merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Informasi yang didapat oleh warga melalui grup whatsapp sudah sangat jelas karena Ibu RT yang cukup komunikatif sehingga membantu masyarakat lebih memahami mengenai program ini dan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Tepat Sasaran

Dengan adanya program Surabaya Smart City warga Kampung SEHATI menerima manfaat secara langsung dan tidak langsung. manfaat secara langsung yang diperoleh warga adalah lingkungan menjadi lebih bersih, tidak ada lagi sampah yang berserakan dan juga kampung menjadi lebih hijau. Manfaat tidak langsung yang diterima oleh warga adalah Kampung SEHATI dijadikan sebagai contoh untuk kampung padat penduduk lainnya terutama yang ada di Kota Surabaya. Saat ini warga Kampung SEHATI sudah melakukan program smart environment dan smart social dengan melakukan kebersihan lingkungan, penghijauan yang tentunya akan merubah kondisi sosial warga Kampung SEHATI. Meskipun sudah memiliki produk untuk dipasarkan namun warga Kampung SEHATI perlu menciptakan inovasi agar bisa menjadi kampung wisata.

Tepat Waktu

Dengan adanya program Surabaya Smart City warga Kampung SEHATI menerima manfaat secara langsung dan tidak langsung. manfaat secara langsung yang diperoleh warga adalah lingkungan menjadi lebih bersih, tidak ada lagi sampah yang berserakan dan juga kampung menjadi lebih hijau. Manfaat tidak langsung yang diterima oleh warga adalah Kampung SEHATI dijadikan sebagai contoh untuk kampung padat penduduk lainnya terutama yang ada di Kota Surabaya. Kampung SEHATI memiliki program yang cukup baik karena meskipun penilaian yang dilakukan oleh Kota Surabaya para warga kampung masih tetap melakukan penghijauan dan kebersihan untuk tetap menjaga lingkungan.

Tercapainya Tujuan

Warga Kampung SEHATI melakukan penghijauan kampung dengan cara Urban Farming atau pemanfaatan lahan sempit untuk bercocok tanam, tanaman yang di tanam pun berupa tanaman Toga, sayur- mayur dan tanaman hias. Untuk potnya sendiri warga

menggunakan botol plastik bekas yang di daur ulang. Kampung SEHATI juga menerapkan Vertical Garden (atau yang biasa disebut taman/ kebun yang tersusun secara Vertical. Tanaman yang biasa ditanam adalah rambat seperti buah markisa, tomat dan lain sebagainya. Warga kampung merasakan bahwa lingkungan bersih aman, mempunyai ciri khas dan menjadi Kampung percontohan.

Perubahan Nyata

Kondisi awal lingkungan Kampung SEHATI merupakan kampung padat penduduk yang jauh dari kata bersih dan hijau namun dengan adanya program pemerintah maka kampung SEHATI berubah cukup signifikan. Adanya penghijauan yang dilakukan dengan lebih baik lagi, kampung SEHATI tidak menjadi kampung padat penduduk yang kumuh sehingga kondisi lingkungannya cukup bersih dan juga terkadang ada beberapa tanaman yang bisa menghasilkan sehingga selain melakukan penghijauan warga Kampung SEHATI juga merasakan hasil dari tanaman yang ditanam. Sebagai salah satu program yang dilakukan oleh warga Kampung Sehati program Surabaya Smart City memberikan manfaat yang cukup banyak bagi warga setempat selain mendapatkan lingkungan yang bersih dan hijau kampung SEHATI juga mendapatkan tambahan pemasukan dari hasil penjualan produk maupun olahan dari tanaman yang ditanam oleh warga Kampung SEHATI.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program

Peran Pemerintah

Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya Smart City melalui penetapan perencanaan, menetapan regulasi (peraturan) yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. Pelaksanaan program Surabaya Smart City di Kampung SEHATI pemerintah memiliki peran penting dimana jika dalam lingkup kecil (RT 03 RW 04) mengkoordinasikan apa yang perlu dijadikan prioritas saat ini dan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam lingkup lebih luas Pemerintah Kota Surabaya mengadakan perlombaan dengan hadiah cukup menarik sehingga membuat program dilaksanakan dengan semangat oleh warga kampung.

Dukungan Masyarakat

Masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan terciptanya Smart City melalui dukungan masyarakat atas program-program, kebijakan, peraturan (regulasi) dan komitmen Pemerintah guna mewujudkan sebuah kota cerdaps. Dukungan masyarakat tersebut dapat berbentuk ikut serta langsung menjadi pelaku dalam membangun kota yang cerdas, menjaga dengan baik atas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah dalam mendukung mewujudkan kota yang cerdas, menyampaikan idea atau saran inovatif untuk memperbaiki lebih baik lagi atas sistem yang sudah ada, setiap masyarakat memiliki kepedulian dan sosial yang tinggi terhadap lingkungannya, setiap individu mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitarnya, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik dengan sesamanya. Kampung SEHATI Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota Surabaya memiliki warga yang cukup peduli dengan kondisi lingkungan sekitar yang mana setiap warganya mengikuti atau berpartisipasi disetiap jalannya program Surabaya Smart City.

Pembiayaan

Pemerintah daerah yang ingin membangun Smart City berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan, merencanakan dan menggambarkan biayanya. Biaya tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jika dimungkinkan Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasus teknologi tersebut. Saat ini pelaksanaan program Surabaya Smart City yang dilakukan oleh Kampung SEHATI pembiayaan yang dilakukan yaitu dari hasil menjadi pemenang di tahun sebelumnya dan terkadang juga menggunakan iuran warga kampung. Hingga saat ini belum ada dana masuk yang diberikan langsung oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung hal tersebut oleh karena itu pengembangan kampungnya juga terbatas.

Teknologi

Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pelayanan administrasi pemerintahan, mengakibatkan sector pelayanan publik dari Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah. Untuk memberikan pelayanan yang baik, dukungan teknologi dirasakan sangat diperlukan. Penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil yang berkualitas, meningkatkan kecepatan, serta sebagai kekuatan untuk bersaing. Saat ini di Kampung SEHATI belum menerapkan suatu teknologi dalam pelaksanaan Surabaya Smart City karena masih terfokus dengan penghijauan sehingga pelaksanaan smart city sedikit terhambat apalagi penghijauan yang dilakukan juga dilakukan secara tradisional

Pembahasan

Program Surabaya Smart City di Kampung SEHATI Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota Surabaya dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan mengembangkan kampung - kampung yang dapat berpotensi menjadi kampung wisata, baik dari segi kebersihan, produk unggulan, kampung aman, dan lain-lain. Efektivitas program Surabaya Smart City di Kampung SEHATI Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota Surabaya diukur menggunakan teori efektivitas program dari Sutrisno (2007) bahwa Program Surabaya Smart City di Kampung SEHATI Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota Surabaya berjalan efektif karena 5 indikator yang ada sudah berhasil dan efektif. Dalam pelaksanaan suatu program tentu terdapat faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program Surabaya Smart City di Kampung SEHATI Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 adalah peran pemerintah dan dukungan masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Surabaya Smart City di Kampung SEHATI Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 adalah pembiayaan dan teknologi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi warga Kampung SEHATI Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota Surabaya perlu melakukan inovasi agar Kampung SEHATI mampu menjadi salah satu kampung wisata yang ada di Kota Surabaya, warga Kampung SEHATI Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 03 RW 04 Kota

Surabaya harus berupaya untuk melakukan rapat dengan pertemuan langsung sehingga hasil yang didapatkan akan lebih maksimal. Pemerintah Kota Surabaya harus mulai memperhatikan perkembangan program Surabaya Smart City utamanya di Kampung SEHATI dimulai dari pembiayaan sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara maksimal. Pemerintah Kota Surabaya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Surabaya Smart City memberikan arahan ataupun bimbingan terkait penggunaan teknologi kepada warga Kampung SEHATI sehingga program akan berjalan dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

Alawadli et al. 2012, Building Understanding of Smart City Initiative, Lecture Note In Computer Science 744. 40-53.

O. Moleong, Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sumber Data Kampung SEHATI:

<https://asemjayablog.wordpress.com>

Surabaya, Pemkot. 2019. "Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019."

Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya 2016 ." Peraturan Walikota Surabaya 2016 ayat 1 pasal 11 tahun 2016)

Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Kencana: Jakarta

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR DI DESA KUPANG, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO

Trisnanto Setyo Putra¹, Tjitjik Rahaju^{2*}

1,2Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep-konsep ini menghasilkan paradigma baru pembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowering and sustainable. Adapun pemberdayaan masyarakat pada sektor perikanan biasanya akan dikembangkan ke arah agrobisnis. Maka perlu ditekankan bahwa sasaran strategis dari pemberdayaan masyarakat kelompok nelayan dan petani tambak bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga untuk upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpukan pada kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia lokal yang handal. Sektor perikanan ini perlu lebih diperhatikan, karena sektor perikanan memberikan kontribusi penting untuk mata pencaharian, ketahanan pangan dan gizi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Adapun fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat kondisi yang ada di lapangan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang akan dikaitkan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat enabling, empowering, protecting dalam Hasan & Azis (2018). Sehingga, nantinya peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana gambaran dari kondisi yang ada di lapangan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, masyarakat pesisir, perikanan

Pendahuluan

Wilayah pesisir pantai menjadi salah satu wilayah potensial yang kaya akan sumber daya alam lautnya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat pesisir pantai yang memanfaatkan potensi tersebut dengan bekerja sebagai nelayan maupun petani tambak. Berdasarkan data komoditas perikanan ITC Trademap yang dipaparkan oleh Humas Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (2021), melalui siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.831/SJ.5/VIII/2021 disebutkan bahwa komoditas perikanan di Indonesia terdiri dari komoditas unggulan yaitu Udang yang penghasilannya mencapai USD 2,04 miliar atau 8,8% terhadap nilai impor total Udang dunia dan ada pula komoditas lainnya seperti Tuna – Cakalang sebesar USD 724 juta (5,0%), Cumi – Sotong – Gurita sebesar USD 509 juta (6,0%), Rajungan – Kepiting sebesar USD 368 juta (6,8%) dan Rumput Laut sebesar USD 280 juta (11,4%). Dari data tersebut, menunjukkan bahwa potensi kelautan di Indonesia yang didalamnya juga terdiri dari wilayah pesisir pantai memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kekayaan alam yang ada di wilayah pesisir pantai sendiri merupakan kekayaan yang dikelola secara langsung oleh negara. Sebagaimana dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sekor, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, sektor perikanan perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, sektor perikanan memberikan kontribusi penting untuk mata pencaharian, ketahanan pangan dan gizi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Stacey et al. 2021). Dengan faktor inilah, pemerintah terus mengupayakan agar pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia dapat mensejahterakan masyarakat pesisir, yaitu sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan ekonominya bergantung pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir yang diantaranya terdapat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan, pemasok produksi perikanan (Sulfati, Rapanna, and Razak 2018)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui program-program pemberdayaan kepada masyarakat pesisir dengan fokus bidang perikanan. Hal ini karena sektor perikanan adalah sektor penting bagi masyarakat khususnya di wilayah pesisir, serta sektor ini juga dapat berarti akan banyak hal dan perlu untuk dipertahankan agar terus bisa adaptif dengan kondisi mendatang. Sehingga, usaha pemerintah seharusnya tidak hanya sebatas menyatukan usaha perikanan saja, melainkan juga memperkuat dan memberdayakan masyarakat yang bekerja di sektor perikanan untuk menghadapi situasi dalam konteks sosial, kultural, ekonomi dan ekologi dimana mereka berada (Chuenpagdee dan Jentoft 2015).

Pemberdayaan menurut Guetierrez dalam (Zastrow and Kirst-Ashman 2015) diartikan sebagai “process of increasing personal, interpersonal, or political power so that individuals can take action to improve their life situations”. Dalam arti lain, pemberdayaan dapat juga disebut sebagai suatu proses yang dilakukan untuk membuat seseorang memiliki kekuatan dalam meningkatkan kondisi kehidupannya menjadi lebih baik. Sedangkan menurut Mardikanto dan Soebianto dalam (Hamid, 2018), pemberdayaan didefinisikan sebagai sebuah proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan, dalam artian yaitu kemampuan dan keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses, maka pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas). Pemberdayaan menekankan bahwa setiap individu mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang cukup untuk bisa mempengaruhi kehidupannya menjadi yang lebih baik (Putra and Ma'ruf 2021). Pemberdayaan masyarakat sebagai proses juga bertujuan untuk memberikan daya kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat yang mandiri dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat secara sendiri (Alamsyah and Rahaju 2022). Adapun konsep pemberdayaan masyarakat menurut Robert Chambers dalam (Hamid, 2018), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep-konsep ini menghasilkan paradigma baru pembangunan yang bersifat people centered, participatory,

empowering and sustainable. Sedangkan konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat biasanya selalu dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan (Abidin As 2019).

Pada intinya, konsep pemberdayaan masyarakat sendiri didasarkan pada penguatan setiap individu maupun masyarakat secara luas supaya mampu untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Parsons dalam (Edi Suharto, 2014) menjelaskan pemberdayaan masyarakat merujuk pada sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Konsep pemberdayaan yang mengarah pada pengembangan masyarakat, biasanya akan lebih mengarah pada konsep participatory rural appraisal (PRA) atau yang artinya yaitu suatu metode untuk mengembangkan kemampuan warga lokal dalam membagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kehidupan dan kondisi, serta merencanakan dan berbuat (Zubaedi 2013). Pengembangan masyarakat sendiri merupakan salah satu bentuk dari perubahan sosial dari bawah ke atas (bottom up), dimana kegiatan pengembangan lebih menekankan pada pembangunan kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat dan memperhatikan berbagai kondisi sosial masyarakat (Mundzir and Zulkarnain 2017). Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat merupakan suatu konsep yang berkesinambungan, karena masing-masing dari konsep tersebut bertujuan untuk menciptakan adanya perubahan sosial melalui prinsip kemandirian masyarakat agar bisa mensejahterakan dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki.

Pada sektor perikanan, pemberdayaan biasanya akan dikembangkan ke arah agrobisnis. Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa sasaran strategis dari pemberdayaan masyarakat kelompok nelayan dan petani tambak bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga untuk upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpukan pada kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia lokal yang handal (Hasan dan Azis 2018). Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan yang kompeten agar bisa memaksimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan di Indonesia dengan berdasarkan pada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up). Namun demikian, masyarakat tetap tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak heran jika akhirnya program tersebut hanya berjalan secara singkat dan berakhir tanpa dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat (Hasan dan Azis 2018). Oleh karena itu, dalam penerapan pemberdayaan masyarakat diperlukan langkah-langkah yang tepat agar program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Kontrol sosial dan mekanisme pengaturan diri kepada masyarakat juga harus diperhatikan sebelum melakukan penyusunan program pemberdayaan. Oleh sebab itu, dukungan pemerintahan yang kuat dalam bentuk undang-undang yang mengakui kebutuhan untuk melindungi perikanan, batas-batas dan untuk mempertahankan skala yang dapat diatur di wilayah tersebut juga diperlukan (Prescott et al. 2015). Pemberdayaan masyarakat pada sektor perikanan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,

yang disebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Adapun pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun (2015) tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, disebutkan pula tujuan dari pemberdayaan ini yaitu untuk mewujudkan kemandirian nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan prinsip dari pemberdayaan masyarakat, maka dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah terletak pada pelaksanaan proses atau tahapan suatu program, yang seharusnya didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Alasannya, karena masyarakatlah yang paling mengetahui atas masalah yang sedang mereka hadapi (Hamid 2018). Maka dari itu, pemerintah perlu untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka.

Pada Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di sektor perikanan telah banyak tersebar di beberapa kota/kabupaten melalui program-program perikanan. Salah satu wilayah yang potensial untuk dilaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan yaitu Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya adalah sebuah dataran delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25M, ketinggian 0-3 m dengan luas 19.006 Ha, yang meliputi 29,99% merupakan daerah pertambakkan yang berada di bagian timur Wilayah Kabupaten (2021). Kabupaten Sidoarjo terkenal akan keunggulannya di sektor perikanan khususnya Udang dan Bandeng. Sebagaimana masyarakatnya yang sebagian juga bekerja sebagai petani tambak. Selain Udang dan Bandeng, adapun komoditas unggulan lainnya di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data produksi ikan di tambak menurut jenis per bulan (kg) 2021

| Bulan | Bandeng | Udang Windu | Udang Vanamel | Nila | Udang Lain | Ikan Lain | Kepiting | Rumput Laut |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Januari | 2 176 600 | 242 400 | 360 400 | 900 500 | 258 900 | 388 600 | 18 700 | 512 200 |
| Februari | 3 731 300 | 396 400 | 606 500 | 789 800 | 193 900 | 291 100 | 18 300 | 204 900 |
| Maret | 4 145 800 | 461 900 | 732 300 | 1 666 900 | 201 500 | 302 400 | 19 500 | 307 300 |
| April | 2 245 700 | 250 100 | 371 900 | 1 863 800 | 289 000 | 433 900 | 19 900 | 819 600 |
| Mei | 2 072 900 | 231 000 | 343 300 | 1 819 700 | 335 000 | 503 000 | 18 000 | 1 331 900 |
| Juni | 2 591 200 | 288 700 | 429 100 | 1 083 800 | 318 100 | 477 500 | 17 600 | 1 229 500 |
| Juli | 2 764 000 | 307 800 | 457 800 | 981 900 | 194 900 | 292 500 | 18 700 | 1 741 800 |
| Agustus | 3 454 900 | 346 300 | 572 100 | 1 792 300 | 337 900 | 507 400 | 19 900 | 1 536 800 |
| September | 4 214 900 | 538 800 | 686 600 | 1 849 100 | 340 800 | 511 500 | 20 200 | 922 100 |
| Oktober | 2 487 600 | 300 000 | 421 900 | 884 900 | 250 600 | 408 000 | 25 600 | 1 324 500 |
| Nopember | 2 245 600 | 450 000 | 461 398 | 934 900 | 171 300 | 293 540 | 21 000 | 409 800 |
| Desember | 2 418 400 | 357 800 | 377 600 | 828 000 | 277 600 | 812 800 | 17 200 | 204 900 |
| Total | 34 548 900 | 4 171 200 | 5 820 898 | 15 395 600 | 3 169 500 | 5 222 240 | 234 600 | 10 545 300 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Sidoarjo

Berdasarkan data produksi ikan di tambak menurut jenis per bulan (Kg) 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2022), dapat dilihat bahwa produksi ikan selain Udang dan Bandeng juga terdapat komoditas lain seperti Ikan Nila, Kepiting dan Rumput Laut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah

kabupaten yang berbatasan dengan wilayah pesisir pantai mempunyai potensi yang besar dalam sektor kelautan dan perikanannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan enabling, empowering, protecting. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sumber informasi bagi pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kupang dari sudut pandang akademis. Sedangkan manfaat penelitian ini secara praktis dapat memberikan gambaran informasi dari pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Metode

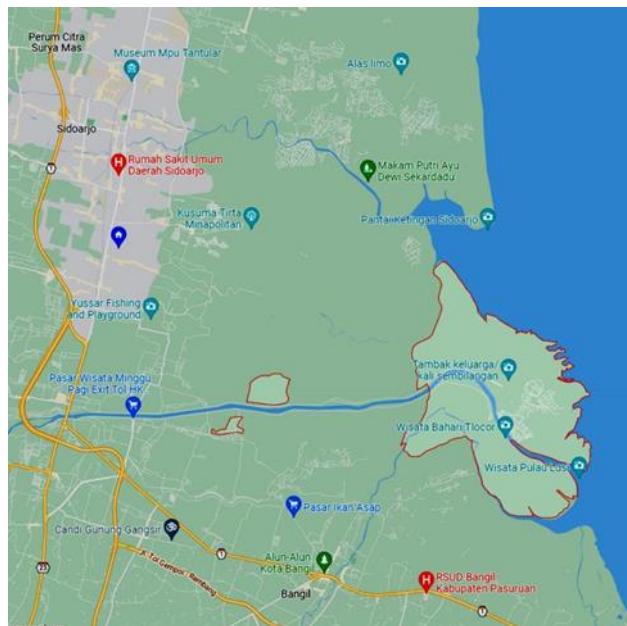
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), deskriptif tidak menekankan pada data berupa angka, melainkan data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar. Sedangkan menurut Sandu Siyoto dan Ali Sodik (2015) menyatakan penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh masing-masing individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif dari partisipan. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas, bahwa jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat, meninjau, mengidentifikasi, serta menggambarkan situasi di lapangan berdasarkan kondisi yang apa adanya. Yang kemudian dari hasil yang didapatkan ditarik kesimpulan berdasarkan fenomena atau fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu berdasarkan sumber primer yaitu dari wawancara maupun sumber sekunder yaitu melalui dokumen-dokumen, publikasi, landasan hukum, maupun laporan.

Fokus peneliti adalah untuk melihat kondisi yang ada di lapangan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang akan dikaitkan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat enabling, empowering, protecting dalam Hasan dan Azis (2018) yang diantaranya yaitu : (1) enabling, dimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. (2) empowering, dimana memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. (3) protecting, dimana dalam proses pemberdayaan harus mencegah orang yang lemah menjadi bertambah lemah yang disebabkan kurang berdayanya dalam menghadapi yang kuat.

Hasil dan pembahasan

Enabling

Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang besar di bidang perikanan khususnya pada sektor budidaya rumput laut. Sehingga, mayoritas masyarakat di desa ini banyak yang bekerja pada sektor perikanan/budidaya rumput laut. Desa ini tergolong wilayah yang terisolir karena lokasi Desa Kupang sendiri terletak di Kecamatan Jabon yang jauh dari pusat perkotaan. Hal tersebut dapat digambarkan pada gambar berikut,



Gambar 1. Wilayah Kecamatan Jabon
(Sumber : Google Maps)

Dikarenakan daerah tersebut jauh dari pusat perkotaan. Maka sumber kehidupan masyarakat setempat bergantung pada potensi yang ada di wilayah tersebut. Sebagaimana dalam pengertian masyarakat pesisir, adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan ekonominya bergantung pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir yang diantaranya terdapat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan, pemasok produksi perikanan (Sulfati, Rapanna, dan Razak 2018).

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui wawancara dengan penyuluh perikanan Kecamatan Jabon yaitu Bapak Agus Tryono, SPi mengatakan, "Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo terdapat masalah lingkungan yang kurang mendukung yang diakibatkan oleh adanya bencara lumpur lapindo yang lumpurnya dibuang ke sungai Brantas dan alirannya tersebut melewati Desa Kupang. Sehingga ini akan mempengaruhi kondisi tanah sekitar dan dapat mengganggu budidaya perikanan setempat. Alhasil, budidaya ikan dan udang sering mengalami gagal panen karena faktor lingkungan. Namun, ada satu komoditas yang masih bertahan dan hingga kini bisa dikembangkan yaitu komoditas rumput laut (Gracilaria sp).

Melalui hasil wawancara dengan penyuluh perikanan Kecamatan Jabon, dapat diketahui bahwa permasalahan utama di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ini adalah permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh lumpur lapindo. Sehingga, potensi ikan dan juga udang di wilayah tersebut menjadi berkurang. Namun, komoditas rumput laut (Gracilaria sp) dapat diketahui masih dapat dikembangkan.

Berdasarkan observasi melalui sumber data sekunder, ditemukan pula bahwa terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berjalan di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022, Kabupaten Sidoarjo dicanangkan untuk program Kampung Perikanan Budidaya yang penerapannya dilakukan di Desa Kupang

yang terletak di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Peresmiannya sendiri dilakukan pada bulan April 2022 lalu yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama Bupati Sidoarjo (2022).

Kampung Perikanan Budidaya sendiri adalah suatu kawasan yang berbasis pada komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan menyinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidaya ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta digerakkan oleh masyarakat, sehingga mampu menjamin produksi yang kontinu dan terjadwal. Pengembangan kawasan perikanan budidaya dengan nilai ekonomi yang tinggi menjadi sasaran dari pemerintah terutama terhadap komoditas berbasis kearifan lokal. Pada Desa Kupang, Kampung Perikanan Budidaya difokuskan pada budidaya rumput laut (*Gracilaria sp*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk keperluan industri modern baik itu bidang pangan maupun non pangan. Berdasarkan siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.285/SJ.5/IV/2022, disebutkan bahwa total produksi rumput laut di sana mencapai 200 – 500 ton per bulan dengan harga jual kurang lebih Rp6.000/kg. Perputaran ekonomi di Kampung Budidaya Rumput Laut Kecamatan Jabon sekitar Rp1,2 sampai Rp3 miliar per bulan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2022a). Dari data tersebut, bila dikaitkan dalam aspek enabling. Maka pemerintah telah berhasil dalam menciptakan potensi di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo menjadi berkembang dengan pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Perikanan Budidaya pada sektor budidaya rumput laut.

Empowering

Masyarakat di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo bisa disebut sebagai masyarakat wilayah pesisir. Maka dari itu, potensi yang bisa dikembangkan dari masyarakat wilayah pesisir ini adalah salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan. Sebagaimana di Desa Kupang, potensi yang dikembangkan di masyarakat adalah potensi budidaya rumput laut melalui program Kampung Perikanan Budidaya. Apabila dilihat dari aspek pemberdayaan, program ini mengarah pada pengembangan masyarakat agar bisa memaksimalkan usahanya terutama dalam budidaya rumput laut demi kesejahteraannya sendiri. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 70 Tahun (2022) disebutkan bahwa tujuan dari Kampung Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:

- (1). Mengembangkan komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal endemik untuk mencegah kepunahan
- (2). Mewujudkan kegiatan usaha perikanan budidaya yang terhubung mulai dari sarana prasarana produksi budidaya, sarana prasarana pasca panen, pengembangan skala usaha para pelaku usaha, dan pasar
- (3). Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya
- (4). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Pembudidaya Ikan
- (5). Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal

Kemudian, berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyuluh perikanan Kecamatan Jabon, Bapak Agus Tryono, SPi kepada peneliti, disebutkan bahwa kegiatan program Kampung Perikanan Budidaya ini dipertanggungjawabkan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menugaskan penyuluh

perikanan untuk melakukan pendampingan di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan sebanyak 10 orang penyuluh perikanan PNS, 1 orang penyuluh perikanan PPPK, 8 orang penyuluh perikanan bantu yang dimana pendampingan ini dilakukan kepada kelompok perikanan diantaranya 5 Pokdadan, 2 KUB Nelayan, dan 1 Poklahsar. Salah satu bentuk pendampingannya dapat dilihat sebagai gambar 2 di bawah ini



Gambar 2. Pendampingan Penyuluh Perikanan Dengan Kelompok Perikanan Desa Kupang

Dari sini, dapat diketahui bahwa kegiatan program Kampung Perikanan Budidaya ini terdapat unsur pendampingan yang dimana pendampingan mengarah kepada prinsip pemberdayaan agar masyarakat dapat dituntun menjadi mandiri. Maka dari itu, bila dilihat dari aspek empowerment, pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi dengan adanya program Kampung Perikanan Budidaya ini.

Protecting

Masyarakat di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya memerlukan kontribusi dari pemerintah untuk membantu mereka agar bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sebagaimana ini juga menjadi kewajiban pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 50 Tahun (2015) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari penyuluh perikanan Kecamatan Jabon, Bapak Agus Tryono, S.Pi berupa proposal Kampung Perikanan Budidaya Desa Kupang, Kecamatan Jabon. Dijelaskan bahwa akses permodalan selama ini pembudidaya mendapatkan dari beberapa stakeholder yaitu beberapa lembaga permodalan seperti Bank, Koperasi, dan lembaga lainnya. Besaran modal yang dipinjamkan kepada pembudidaya rata-rata mulai dari Rp 25 juta hingga Rp500 juta per orang. Adapun masyarakat setempat juga terdapat koperasi perikanan sumber mulyo 5758 yang anggotanya terdiri dari pembudidaya rumput laut dengan tujuan utama pendirian koperasi adalah eksport sendiri rumput laut yang dihasilkan kelompok. Adapun selama ini penyuluh perikanan juga melakukan survei untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan kemudian akan dibantu untuk dibuatkan proposal pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat/daerah. Adapun fasilitas yang sudah disediakan bagi masyarakat rumput laut

berdasarkan data yang diperoleh peneliti adalah berupa bangunan yaitu 2 buah gudang rumput laut, serta mesin berupa 2 buah alat press rumput laut dan 1 buah blower rumput laut. Adapun untuk fasilitas tersebut dapat dilihat sebagai berikut,



Gambar 3. Mesin untuk pengolahan



Gambar 4. Gudang Rumput Laut

Adapun, Agus Tryono, S.Pi menambahkan bahwa fasilitas bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk program Kampung Perikanan Budidaya rumput laut ini yaitu berupa sepeda motor tosa untuk pengangkutan rumput laut, bangunan gudang untuk bibit rumput laut, bibit udang, bibit ikan. Adapun bantuan dari pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah berupa perbaikan jalan produksi tambak rumput laut, normalisasi sungai, dan adanya pembangunan jembatan tambak untuk memudahkan akses bagi para pembudidaya rumput laut.

Berdasarkan dari informasi diatas, maka dapat diketahui bahwa program Kampung Perikanan Budidaya ini juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk kemajuan usaha budidaya rumput laut di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Maka apabila dilihat dari aspek protecting, maka pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ini juga sudah terpenuhi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, melalui pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat baik dari aspek enabling, empowering, protecting telah terpenuhi. Itu artinya, bahwa pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat wilayah pesisir khususnya masyarakat Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana. Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Perikanan Budidaya adalah upaya untuk meningkatkan usaha perikanan setempat dengan memaksimalkan potensi rumput laut (*Gracilaria sp*). Adapun untuk potensi lain seperti ikan dan udang tidak dapat maksimal karena adanya faktor lingkungan yang tidak mendukung. Pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sendiri dilakukan melalui penugasan penyuluh perikanan untuk melakukan pendampingan kepada para pembudidaya rumput laut. Sehingga, para pembudidaya rumput laut juga akan dibantu dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok perikanan. Para pembudidaya rumput laut juga telah disediakan fasilitas berupa gedung, mesin, serta transportasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo maupun pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, ini akan mempermudah masyarakat dalam beraktivitas menjalankan usahanya untuk budidaya rumput laut demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin As, Zaenal. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang." *Jurnal Caraka Prabu* 1(2): 84–122.
- Alamsyah, M F, and T Rahaju. 2022. "Pengembangan Kampung Kreasi Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kampung Kreasi Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik)." *Publika*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/45314> <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/45314/38459>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2022. Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo. <https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2021/02/26/e3e10d819e0bbfee5353dbbd/kabupaten-sidoarjo-dalam-angka-2021.html>.
- Chuenpagdee, Ratana, and Svein Jentoft. 2015. "Exploring Challenges in Small-Scale Fisheries Governance." *MARE Publication Series* 13(1): 3–16.
- Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 2021. "Peringkat Indonesia Sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkat Di Masa Pandemi." <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi> (August 5, 2022).
- Hamid, Hendra. 2018. 1 De La Macca Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. ed. Tuty Suciaty Razak. Makassar: De La Macca.

- Hasan, Muhammad, and Muhammad Azis. 2018. 2018 Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Kedua. Makassar: CV. Nur Lina.
- Indra Setiawan, and Didik Kusbiantoro. 2022. "Menteri Trenggono Canangkan Desa Kupang Sidoarjo Jadi Kampung Rumput Laut." Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/595561/menteri-trenggono-canangkan-desa-kupang-sidoarjo-jadi-kampung-rumput-laut> (August 26, 2022).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2022a. "Menteri Trenggono Canangkan Kampung Budidaya Rumput Laut Di Sidoarjo Untuk Penuhi Pasar Ekspor." <https://kkp.go.id/artikel/39967-menteri-trenggono-canangkan-kampung-budidaya-rumput-laut-di-sidoarjo-untuk-penuhi-pasar-ekspor> (September 20, 2022).
- . 2022b. "Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Di Kampung Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2022 (Perdirjen Perikanan Budidaya No 70 Tahun 2022)." <https://www.sidoarjokab.go.id/profil-masyarakat> (May 26, 2022).
- Peraturan Pemerintah RI. 2015. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil (PP No 50 Tahun 2015)." : 28. <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-no.50-th-2015-ttg-pemberdayaan-nelayan-kecilpembudidaya-ikan-kecil.pdf>.
- Prescott, James, James Riwu, Dirk J. Steenbergen, and Natasha Stacey. 2015. "Governance and Governability: The Small-Scale Purse Seine Fishery in Pulau Rote, Eastern Indonesia." MARE Publication Series 3(4): 61–84.
- Putra, Gery Abimanyu, and Muhammad Farid Ma'ruf. 2021. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Barang Bekas Rumah Tangga Di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto." Publika 10(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/43473/37273>.
- Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UU No 1 Tahun 2014)." <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>.
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. ed. Ayup. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Stacey, Natasha et al. 2021. "Developing Sustainable Small-Scale Fisheries Livelihoods in Indonesia: Trends, Enabling and Constraining Factors, and Future Opportunities." Marine Policy 132: 104654. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>.
- Sugiyono, D. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. Alfabeta.
- Sulfati, Andi, Patta Rappanna, and Nurlaelly Razak. 2018. "Empowerment of Fishing Communities in the Management of the Results of the Sea in Indonesia." 3(9): 36–42.

Zastrow, Charles H., and Karen K. Kirst-Ashman. 2015. Brooks Cole Empowerment Series
Understanding

Human Behavior and the Social Environment. 10th ed. Boston: Cengage Learning.

Zubaedi. 2013. "Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik." Pengembangan
Masyarakat: Wacana dan Praktik (1st ed.). (Kencana Prenada Media Grup): 270.

KAJIAN PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DALAM MEMBANGUN PERSEPSI MASYARAKAT PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

S. Teguh Wiyono^{1*}, Syaifullah Mahdi², Pandu Briantisno³
¹²³Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: teguh.wiyono@hangtuah.ac.id

Abstrak

Peran Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Di era otonomi daerah sekarang ini dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur negara, sehingga peran dan gaya kepemimpinan partisipatoris sangat dibutuhkan, karena dapat menentukan arah kebijakan dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kajian penelitian tersebut sesuai dengan judul, maka permasalahan tersebut adalah: (1) Bagaimanakah gaya kepemimpinan kepala daerah di Jawa Timur di lokasi penelitian, dalam membangun persepsi masyarakat, ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah?; (2) Bagaimanakah persepsi masyarakat atas gaya kepemimpinan kepala daerah tersebut, yang dapat dipergunakan ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah?; (3) Bagaimanakah model gaya kepemimpinan kepala daerah yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah?. Kajian ini dilakukan penelitian di 3 (tiga) pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun temuan penelitian tersebut: (1) Kepala Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan yang tinggi dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para bawahan/staf anggota organisasi, dan lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, serta memberikan nasehat dalam rangka mencapai tujuan dengan melibatkan masyarakat. (2) Cenderung lebih dominan mengarah pada gaya kepemimpinan partisipatif dan konsultatif. (3) Model gaya kepemimpinan kolaborasi adalah yang paling sesuai situasi dan kondisi di daerah penelitian, yaitu kolaborasi gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan konsultatif dan gaya kepemimpinan transformasional.

Kata Kunci: *gaya kepemimpinan, partisipasi, persepsi masyarakat*

Pendahuluan

Peran Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah. Di era otonomi daerah sekarang ini dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur negara, sehingga peran dan gaya kepemimpinan partisipatoris sangat dibutuhkan, karena dapat menentukan arah kebijakan dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam negara yang penuh kompetisi ini, sangat diperlukan kemampuan seorang pemimpin dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan atau responsif terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif, yang didukung dari persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Munculnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan konsekwensi dari komitmen terhadap demokrasi, sehingga perlu

diupayakan agar pemimpin dalam otonomi daerah dapat membangkitkan persepsi dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam program-program pemerintah. Layanan publik kepada masyarakat tidak hanya semata-mata berdasarkan pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga unsur kebersamaan (equality), dengan demikian perlunya kesetaraan antara nilai efisiensi dan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan antara kepemimpinan daerah bersama-sama masyarakat.

Memasuki perubahan dunia globalisasi yang begitu cepat, kita dihadapkan paling tidak dua tantangan, yaitu tantangan perubahan dari (1) masyarakat agraris ke masyarakat industri, dan (2) tantangan dalam menerima arus perubahan peradaban masyarakat pasca Industri. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan baru kepada masyarakat dan lingkungannya, terhadap perubahan dan penyusuaian paradigma dan praktik gaya kepemimpinannya dalam pemerintahan dan pembangunan. Reformasi desentralisasi yang dimulai pada Tahun 2001, merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang No 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa, sehingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula. Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarakat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses perencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi. Sedikitnya untuk dua alasan: pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, salah satu unsur terpenting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin partisipatoris adalah kemampuan berpikir dan bergelut dengan imajinasi dan kemungkinan-kemungkinan yang melahirkan hubungan-hubungan serta temuan-temuan baru yang bermakna tinggi, dengan berinteraksi pada gagasan-gagasan/usulan masyarakat, dan lingkungan hidup. Unsur penting lainnya yang perlu diperhatikan seorang pemimpin kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dibentuknya kreativitas yang tinggi dalam organisasi untuk kepentingan masyarakat, seperti pentingnya mendorong kreatifitas aparatur pemerintah, agar mampu menciptakan sesuatu yang baru, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, melakukan perubahan cara kerja tradisional menuju manajemen modern, yaitu mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,

keterlibatan warga dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh Bupati sebagai kepala daerah, kembali mencuat sebagai topik yang menarik perhatian pada masyarakat luas akhir-akhir ini, akademisi maupun praktisi di bidang tata pemerintahan dan politik lokal di Indonesia.

Terkait dengan ini, ada satu pertanyaan penting yang tetap sulit dijawab secara gampang, yaitu sudah sampai dimanakah proses keterlibatan warga dalam tata pemerintahan daerah berlangsung, karena dengan tidak dilibatkannya warga masyarakat akan membawa dampak yang luas dalam arti kata banyak korban (seperti kasus Mesuji di Lampung dan Sape di NTB baru-baru ini), hal ini semuanya disebabkan tergantung dari gaya kepemimpinan Bupati sebagai kepala daerah. Walaupun berbagai reformasi untuk mendorong partisipasi yang lebih mendalam dan meluas telah dilakukan, tetapi tetap masih ada keraguan bahwasanya partisipasi di Indonesia sudah “berjalan” dengan baik. Berbagai publikasi terkini tentang praktik-praktik partisipasi warga di Indonesia yang dituliskan berdasarkan pengalaman empirik mengemukakan dua realita: (1) di satu sisi kehidupan berpartisipasi lebih berkembang, namun di sisi lain, (2) terungkap adanya sejumlah tantangan serius yang tidak saja dapat mengurangi efektivitas partisipasi, bahkan mengancam keberlanjutannya era otonomi daerah.

Gaya Kepemimpinan merupakan suatu cara yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk bekerjasama dan berdaya upaya dengan penuh semangat dan keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya. Di berbagai daerah dalam Provinsi Jawa Timur, bahkan sudah ada pemerintah daerah dan atau DPRD, yang telah melaksanakan berbagai tindakan dengan sungguh-sungguh untuk merespon keinginan dari masyarakatnya untuk mendapatkan akses yang lebih baik dan ikut dalam proses pengambilan keputusan publik (strategi dan kebijakan) melalui penciptaan berbagai kesempatan partisipasi yang berkelanjutan, semuanya itu tergantung dari kepemimpinan Bupati sebagai kepala daerah. Indikasi positif lainnya dapat dilihat melalui meningkatnya kualitas partisipasi yang dijalankan, makin inklusifnya masyarakat, semakin banyaknya aturan dan kerangka hukum yang mengatur partisipasi dan juga semakin besarnya sumber daya (dana) yang bisa digunakan untuk membiayai program yang dirumuskan melalui proses kepemimpinan partisipatoris. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah: (1) bagaimanakah gaya kepemimpinan kepala daerah di Jawa Timur di lokasi penelitian, dalam membangun persepsi masyarakat, ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah? (2) bagaimanakah persepsi masyarakat atas gaya kepemimpinan kepala daerah tersebut, yang dapat dipergunakan ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah? (3). bagaimanakah model gaya kepemimpinan kepala daerah yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah?

Metode

Populasi penelitian ini berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota pada SKPD-SKPD di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pamekasan, dan Kota Kediri. Adapun sampel yang ditarik secara purposive sampling adalah pada masing-masing obyek penelitian. Berdasarkan atas sumber data diperoleh, jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara sebagai berikut:

(1). Wawancara; wawancara dilakukan secara langsung dengan responden (Bupati, Sekda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dewan dan tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Desa/Lurah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Wartawan) secara mendalam (indept interview) tentang fenomena penelitian yang dikaji.

(2). Kuesioner; yaitu membagikan kuesioner kepada responden secara langsung untuk mengetahui kadar atau bobot penerapan gaya kepemimpinan kepala pemerintah daerah dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Guna melengkapi data-data primer, peneliti juga menggali data sekunder yang relevan yang diperoleh dengan cara:

(1). Studi dokumen dan literatur; yaitu mengumpulkan data yang tersedia dalam bentuk laporan-laporan maupun dalam bentuk lain yang terdokumentasi yang relevan dengan fenomena yang dikaji.

(2). Studi Hasil Evaluasi, yaitu studi evaluasi terhadap berbagai produk kebijakan pemerintah daerah menyangkut proses maupun pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah diputuskan. Berdasarkan analisis tersebut, maka model gaya kepemimpinan bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akan datang yang dapat menjadi alternatif terbaik bagi Kepala Daerah dalam menggunakan gaya kepemimpinannya. Sehingga dengan demikian, maka model/gaya kepemimpinan yang diusulkan adalah model gaya kepemimpinan kolaborasi, yaitu kolaborasi gaya kepemimpinan partisipatif, konsultatif dan gaya kepemimpinan transformasional. Adapun model yang ideal dan rasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Deskripsi Gaya Kepemimpinan

| Gaya Kepemimpinan | Penjelasan |
|---------------------------|---|
| Kepemimpinan Partisipatif | <ul style="list-style-type: none"> a. Cenderung memberikan kepercayaan kepada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tanggung jawab yang harus diselesaikan. b. Lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan keputusan. c. Memberikan dukungan yang tinggi dan pengarahan yang rendah kepada bawahan. d. Selalu memonitor, mengawasi pendeklegasian terhadap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan atau staf. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Kepemimpinan Konsultatif | <ol style="list-style-type: none"> a. Lebih banyak melakukan Interaksi dengan para bawahan/staf dan anggota organisasi. b. Banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, memberikan nasehat dalam rangka mencapai tujuan kepada bawahan. c. Memberikan pengarahan sangat tinggi serta dukungan tinggi, tetapi juga berusaha mendengar keluhan-keluhan bawahan mengenai keputusan juga ide-ide dan saran dari bawahan. d. Pengawasan terhadap pengambilan keputusan tetap pada Bupati. |
| Kepemimpinan Transformasional | <ol style="list-style-type: none"> a. Selalu memiliki Kepercayaan diri yang kuat, hadir disaat-saat sulit, memegang teguh nilai-nilai moral, dan menumbuhkan kebanggaan pada bawahan, serta mempunyai visi jelas (<i>attributed charisma</i>). b. Langkah-langkahnya selalu mempunyai tujuan yang pasti, dan agar bawahan mengikutinya secara sukarela. c. Berusaha memotivasi, membangkitkan semangat dan minat bawahan, disamping itu tetap berusaha meyakinkan akan tujuan dan misi organisasi. d. Berusaha melihat, memperhatikan, mengenali kemampuan individu yang berguna untuk organisasi. e. Berusaha meyakinkan bawahan bahwa untuk bersama-sama menciptakan produktivitas kerja tinggi, usaha keras, komitmen, dan kapasitas kerja yang tinggi. |

Akhirnya, hasil penelitian ini bahwa model gaya kepemimpinan yang dikemukakan sebagai alternatif bagi Kepala Daerah dalam menjalankan tata pemerintahan bukanlah gaya kepemimpinan yang satu-satunya. Karena Peneliti menyadari bahwa gaya kepemimpinan yang dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi dan partisipasi dalam tata pemerintahan sebagian besar tergantung pada situasi dan kondisi. Apa yang merupakan gaya kepemimpinan efektif dalam suatu situasi dapat menjadi tidak kompeten dan tidak efektif dalam situasi lainnya.

Hasil dan pembahasan

Terdapat beberapa pengertian kepemimpinan yang diutarakan oleh beberapa pakar sumber daya manusia; diantaranya Hemphill dan Coons (1957), mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah perilaku individu dalam mengarahkan aktifitas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. (Tannenbaum, Weschler, dan Massanik, 1961). Kemudian Stogdill (1974), mendefinisikan kepemimpinan sebagai pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi.

Selanjutnya kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi (Katz dan Kahn, 1978). Kemudian Rauch dan Behling (1984), mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Dwivedi (1979), mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses mempengaruhi orang lain untuk memobilisasikan dan mengarahkan usaha mereka kepada tujuan-tujuan tertentu dan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Koontz dan O'Donnell (1980), menyatakan bahwa kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk ikut serta dalam pencapaian tujuan umum. Jacob dan Jacques (1990), mendefinisikan kepemimpinan sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Gibson dan kawan-kawan (1985), mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku kelompok tanpa paksaan. Kemampuan mempengaruhi dalam hal ini berhubungan dengan pemuasan kebutuhan bawah. Menurut (Stoner et al., 1996), mendefinisikan kepemimpinan manajerial sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas yang berkaitan dengan tugas dan anggota kelompok.

Jika definisi-definisi tersebut dikaji lebih jauh, maka ada beberapa perbedaan dan persamaan penekanan, sebagian menekankan pada kemampuan seseorang mengarahkan orang lain, lainnya menekankan pada kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan pada situasi tertentu. Implikasi semua definisi tersebut adalah bahwa seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan lebih untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dalam pencapaian tujuan. Stoner et al. (1996), secara rinci mengemukakan implikasi definisinya sebagai berikut:

1. Kepemimpinan melibatkan orang lain (karyawan atau pengikut). Dengan kemauan mereka menerima pengarahan dari pemimpin dan membuat proses kepemimpinan menjadi mungkin, tanpa orang yang dipimpin, semua mutu kepemimpinan dan seorang manajer menjadi tidak relevan.
2. Kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pemimpin dan anggota kelompok. Anggota kelompok bukannya tanpa kekuasaan, mereka dapat dan membentuk aktivitas kelompok dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, pemimpin biasanya mempunyai kekuasaan lebih besar.
3. Kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut dengan berbagai cara. Artinya, seorang

pemimpin tidak hanya harus mempu menyuruh bawahannya untuk mengerjakan sesuatu, tetapi juga dapat mempengaruhinya untuk mengikuti petunjuk dan instruksinya.

4. Kepemimpinan menggabungkan tiga aspek pertama dan mengakui bahwa kepemimpinan adalah mengenai nilai.

Jika pengertian kepemimpinan yang diajukan oleh Tannenbaum (1961), tersebut dikaji lebih jauh, maka hal yang menarik adalah proses interaksi dan sating mempengaruhi antar pribadi. ini berarti bahwa aktivitas kepemimpinan akan berjalan dengan baik kalau terjadi hubungan timbal batik melalui proses komunikasi yang jelas. Pemahaman ini mengarah kepada teori pertukaran sosial yang kemudian berkembang menjadi salah satu pendekatan dalam kajian interaksi pemimpin dengan bawahan atau pengikutnya. Walaupun definisi kepemimpinan memiliki berbagai rumusan dengan berbagai perbedaan, akan tetapi pada hakekatnya ada beberapa anasir utama yang menggerakkan jalannya proses kepemimpinan, yaitu adanya pemimpin, bawahan, tujuan yang ingin dicapai, dan situasi tertentu. Goestsch dan Devis (1997), berpendapat, ada tiga faktor yang mempengaruhi organisasi dalam mengimplementasikan kegiatannya sesuai dengan rencana, yaitu kepemimpinan, fasilitas dan komitmen manajemen. Kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan sehingga orang-orang termotivasi dalam pencapaian tujuan tertentu. Dari definisi di atas terlihat bahwa hubungan yang dilakukan pimpinan merupakan upaya kepemimpinan dan proses komunikasi dalam kegiatan itu menjadi penting (Gibson et al.).

Ada kepemimpinan tercermin pada interaksi yang terjadi kemudian menimbulkan pengikut. Menurut pandangan lama bahwa kepemimpinan merupakan sifat yang dibawa sejak lahir. Ada beberapa sifat penting bagi pimpinan yang berlaku secara universal. Sifat-sifat pimpinan yang berhasil seperti suka bergaul, disiplin, bekerja keras, kemudian muncul pandangan yang berdasar pada:

1. Hubungan antara perilaku pimpinan dan performa bawahan dan kepuasan bawahan.
2. Fungsi pemeliharaan yang mempengaruhi tingkah laku anggota terhadap pengembangan dan kekuatan organisasi unit kerja.
3. Non fungsional dan disfungsional yaitu suatu kegiatan yang tidak membantu kelompok bahkan membahayakan organisasi tersebut.

Pengertian pemimpin seringkali disamakan dengan pimpinan, padahal pemimpin dan pimpinan mempunyai perbedaan yaitu kata mempengaruhi (to influence) merupakan kata kunci yang selalu identik dengan peran pemimpin (leader). sedangkan kata menggerakkan (to actuate) biasanya terkait dengan peran pemimpin (manager). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Mangunhardjono (1976) yang mengemukakan sebagai berikut: pemimpin disebut juga leader, akar katanya to lead yang mengandung beberapa pengertian yang saling berhubungan yaitu bergerak lebih awal, berjalan didepan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran, pendapat, tindakan orang lain, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.

Dalam kehidupan berorganisasi, tidaklah bisa dihindarkan adanya dua peran, disatu pihak sebagai pimpinan dan dipihak lain sebagai bawahan. Dalam hal ini pimpinan

berperan amat penting dalam mencapai tujuan organisasi, namun eksistensi bawahan tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa keikutsertaan bawahan maka organisasi itu akan menemui kesulitan dalam mencapai tujuan. Sukses tidaknya dalam mencapai tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan dalam mengajak dan menyakinkan mereka, sehingga para bawahan tersebut ikut berpartisipasi terhadap apa yang telah dianjurkan dengan penuh semangat. Oleh sebab itu, pimpinan seharusnya dapat membujuk, memerintah, mempengaruhi dan memberi semangat bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pada suatu perusahaan atau organisasi bila bawahan tidak termotivasi untuk bekerja, tingginya absensi, rendah moral serta ketidakpuasan ini menandakan pemimpin tidak dapat memotivasi bawahan karena penerapan gayanya yang tidak sesuai dengan lingkungan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pemimpin harus dapat menunjukkan cara/gaya supaya bawahan dapat bekerja dengan baik.

Oleh karena itu, bila seorang pemimpin ingin lebih mudah mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan tugas bawahan harus memahami bahwa kemauan dan kemampuan bawahan sening kali berbeda. Seperti yang dinyatakan oleh Tunggal (1996), ada empat variasi kemauan dan kemampuan bawahan yaitu:

1. Ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu.
2. Ada bawahan yang tidak mau tapi tidak mampu.
3. Ada bawahan yang tidak mau walau mampu.
4. Ada bawahan yang mau dan mampu.

Walaupun demikian, menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (dalam Tunggal, 1996) tidak ada satu gaya yang terbaik yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan secara efektif. Sehingga gaya kepemimpinan sangat terkait dengan tingkat kematangan (kedewasaan) bawahan yang akan dipimpinnya. Salah satu pakar ekonomi yang memperhatikan organisasi adalah Frederick Taylor (1911). Pemikiran Taylor menekankan bagaimana menciptakan upah yang layak pada bawahan dengan menganggap bawahan sebagai alat produksi, sehingga para bawahan haruslah mengejar jumlah produksi yang telah ditetapkan dan bawahan dibayar sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Menurut Taylor orang akan cukup puas dengan hasil pekerjaannya, manusia bekerja layaknya mesin oleh karena itu bawahan tidak perlu berinteraksi satu dengan lain. Taylor menganggap tidak perlu memperhatikan faktor motivasi bawahan.

Dalam studi tentang kepemimpinan dalam organisasi, maka teori kepemimpinan dapat diklasifikasikan atau dibedakan sebagai berikut:

1. Teori Kepemimpinan menurut Teori Sifat

Pendekatan menurut teori ini, dipandang sebagai suatu kombinasi dari sifat atau ciri individu yang tampak pada seorang pemimpin. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dapat ditemukan sejumlah individu terbatas dari kepemimpinan yang efektif. Ciri-ciri tersebut antara lain: menyangkut tentang intelektualitas, emosional, fisik, kepercayaan diri, pengendalian berbicara dan lain-lain. Menurut Keith Davis yang diikuti Thoha (1995), mengatakan ada empat sifat utama yang berpengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam suatu organisasi, yaitu: kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi serta sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Dalam Stogdill's Handbook of Leadership, Bernard M. Bass yang dikutip

oleh Gibson (1992), dalam membuat ringkasan dari sifat-sifat pemimpin yang paling banyak diteliti seperti dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2 Sifat-sifat yang Dikaitkan dengan Keefektifan Kepemimpinan

| Kecerdasan | Kepribadian | Kemampuan |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Pertimbangan | Kemampuan Adaptasi | Kemampuan memperoleh Kerjasama |
| Ketegasan | Kewaspadaan | Kerjasama |
| Pengetahuan | Kreatifitas | Popularitas dan Prestise |
| Kefasihan Berbicara | Integritas Pribadi | Kemampuan Bergaul |
| | Percaya Diri | Partisipasi Sosial |
| | Keseimbangan dan Pengendalian Emosional | Bijaksana dan Diplomasi |
| | Mandiri | |

Walaupun sifat yang dikemukakan secara normatif merupakan sifat ideal yang diinginkan dalam diri seorang pemimpin, kenyataannya tidak seorangpun pemimpin memiliki seluruh sifat ideal secara sempurna. Hal ini tampak terutama pada adanya perbedaan-perbedaan dalam sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki setiap orang.

Beberapa gaya kepemimpinan menurut teori perilaku adalah Teori X dan Y dari Douglas McGregor. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan seseorang dipengaruhi oleh anggapan-anggapan pemimpin terhadap sifat dasar manusia, anggapan-anggapan tersebut terbagi menjadi dua. Anggapan-anggapan *Teori X* adalah sebagai berikut:

- (1). Rata-rata pembawaan manusia malas, tidak suka akan pekerjaan dan cenderung untuk menghindarinya.
- (2). Agar orang mau menjalankan tugasnya, maka orang harus dipaksa, diawasi, diarahkan dan diancam dengan hukuman.
- (3). Pada umumnya manusia lebih suka diarahkan, ingin menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi relatif kecil dan menginginkan keamanan hidup diatas segala-galanya.

Sedangkan anggapan-anggapan *Teori Y* adalah sebagai berikut :

- (1). Bekerja adalah kodrat manusia, seperti halnya bemain dan istirahat.
- (2). Pengawasan dan ancaman hukuman bukanlah satu-satunya cara dalam mencapai tujuan organisasi, orang akan melakukan pengendalian diri dan pengarahan diri untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

- (3). Keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berhubungan dengan prestasi mereka.
- (4). Rata-rata manusia dalam kondisi yang layak, belajar tidak hanya untuk menerima tetapi juga bertanggung jawab.
- (5). Potensi besar untuk melakukan imajinasi, kecerdikan dan kreatifitas dalam penyelesaian masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh karyawan.
- (6). Potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan industri modern.

McGregor mengatakan bahwa seorang pimpinan yang menganut anggapan-anggapan Teori X, akan menyukai gaya kepemimpinan otokratis, sebab pemimpin yang bergaya otokratis mempunyai asumsi bahwa kuasa pemimpin berasal dari posisi yang mereka miliki dan orang-orang yang dipimpinnya pembawaan malas serta tidak percaya diri. Sebaliknya, pemimpin yang mengikuti anggapan-anggapan Teori Y, akan lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratis, sebab mempunyai asumsi bahwa kuasa pemimpin berasal dari kelompok yang dipimpin dan orang-orang yang dipimpin pada dasarnya dapat mengarahkan dirinya sendiri dan kreatif di tempat kerja apabila dimotivasi dengan tepat. Hersey dan Blanchard juga menjelaskan bahwa kepemimpinan situasional tidak hanya mengajukan gaya kepemimpinan yang paling tinggi kemungkinan efektifitasnya bagi berbagai tingkat kematangan, tapi juga menunjukkan kemungkinan berhasil dari gaya lainnya apabila pemimpin tidak dapat menerapkan gaya yang paling tepat.

Tabel 3 Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan berbagai tingkat kematangan bawahan

| Level Kematangan | Gaya yang Sesuai |
|--|---|
| M ₁ Rendah Mau dan yakin tapi tidak mampu | G ₁ Memberitahukan perilaku tinggi tugas dan rendah hubungan |
| M ₂ Rendah ke sedang Mulai mampu tapi tidak mau atau tidak yakin | G ₂ Menjual Perilaku tinggi tugas dan tinggi hubungan |
| M ₃ Sedang ke tinggi Mampu tapi tidak mau atau tidak yakin | G ₃ Mengikutsertakan perilaku tinggi hubungan rendah dan rendah tugas |
| M ₄ Tidak Mampu / kompeten dan mau / yakin | G ₄ Mendelegasikan perilaku rendah hubungan dan rendah tugas |

Kemungkinan berhasil dari masing-masing gaya bagi keempat kematangan bawahan ini tergantung pada sejauh mana gaya tersebut mempunyai kemungkinan efektif paling tinggi. Tingkat efektifitas dari masing-masing gaya kepemimpinan terhadap berbagai tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Tingkat Efektifitas Masing-masing Gaya terhadap Berbagai Tingkat Kematangan

| Kematangan | Gaya Terbaik | Gaya Terbaik Kedua | Gaya Terbaik Ketiga | Gaya Tak Efektif |
|----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| M ₁ | G ₁ | G ₂ | G ₃ | G ₄ |
| M ₂ | G ₂ | G ₁ /G ₃ | - | G ₄ |
| M ₃ | G ₃ | G ₂ /G ₄ | - | G ₁ |

Berbeda dengan pemikiran tentang gaya kepemimpinan di atas, menurut study kepemimpinan Universitas Iova dalam Nawawi dan Martini, (1992) ada tiga gaya kepemimpinan.

1. *Gaya Kepemimpinan Otoriter*, keputusan atau wewenang, sebagian besar mutlak berada pada pimpinan. Proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin dan bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Gaya Kepemimpinan Demokrasi*, adanya pembagian kekuasaan atau wewenang yang jelas yang tidak mulak berada pada pimpinan, sedangkan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, kebijaksanaan ditetapkan bersama-sama dan bawahan di ikutsertakan untuk memberi saran, ide dan pertimbangannya dalam proses pengambilan keputusan, serta menimbulkan tanggung jawab bagi pemimpin.
3. *Gaya Kepemimpinan Bebas (Laissez Faire)*, kepemimpinan yang sepenuhnya diserahkan pada orang-orang yang dipimpin oleh karena itu setiap orang yang mempunyai kemampuan dan kehendak sendiri maka akan berakibat suasana kebersamaan tidak tercipta, kegiatan tidak searah dan simpang siur. Wewenang tidak jelas dan tanggung jawab menjadi kacau, setiap anggota saling menuduh dan saling salah menyalahkan atau lempar melempar jika meminta pertanggung jawaban.

Pola perilaku seorang pemimpin dalam sebuah organisasi menjadi salah satu penentu bagi keberhasilan organisasi bersangkutan untuk mencapai tujuannya, karena terkait dengan penerapan nilai-nilai budaya yang diberlakukan bagi seluruh anggota organisasi tersebut. Pemimpin dan budaya organisasi menjadi satu kesatuan utuh yang saling berkaitan dan berpengaruh dalam menentukan pencapaian tujuan organisasi. Dalam praktiknya, dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut berkembang beberapa tipe kepemimpinan, di antaranya adalah sebagian berikut.

1. *Tipe Otokratis*, adalah pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri-ciri (a) menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi; (b) mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi; (c) menganggap bawahan sebagai alat semata-mata; (d) tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat; (e) terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya; (f) dalam tindakan penggerakkannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum.
2. *Tipe Militeristik*, tipe pemimpin ini berbeda seperti seorang pemimpin tipe militerisme atau seorang pemimpin dalam organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat (a) dalam menggerakkan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan; (b) dalam

mengerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya; (c) senang pada formalitas yang berlebih-lebihan; (d) menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan; (e) sukar menerima kritikan dari bawahannya; (f) menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

3. *Tipe Paternalistik*, seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin paternalistik adalah seorang yang memiliki ciri-ciri (a) menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa; (b) bersikap terlalu melindungi (*overly protective*); (c) jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan; (d) jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif; (e) jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya; (f) dan sering bersikap maha tahu.
4. *Tipe Karismatik*, hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan karena pada umumnya, mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang sebab musabab seseorang menjadi pemimpin yang *karismatik*, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (*supra natural powers*). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma, misalnya; Gandhi bukanlah seorang yang kaya, Iskandar Zulkarnain bukanlah seorang yang fisik sehat, John F Kennedy adalah seorang pemimpin yang memiliki karisma meskipun umurnya masih muda pada waktu terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.
5. *Tipe Demokratis*, pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern saat ini, hal ini terjadi karena tipe kepemimpinan ini memiliki karakteristik (a) dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia; (b) selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari pada bawahannya; (c) senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya; (d) selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan *teamwork* dalam usaha mencapai tujuan; (e) ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian, diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain; (f) selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya; (g) berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokratis bukanlah hal yang mudah, namun, karena pemimpin yang demikian adalah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua pemimpin berusaha menjadi

seorang pemimpin yang demokratis. Fungsi dan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri secara hierarkhi di bawah kewenangan dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional Provinsi. Hampir semua tenaga rehabilitasi memiliki pengalaman dalam melaksanakan pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan didukung analisis seperti yang telah diuraikan di atas, serta memperhatikan permasalahan penelitian dan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

- (1). Gaya kepemimpinan Kepala Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang sebagai obyek penelitian yaitu; Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pamekasan dan Kota Kediri adalah memberikan dukungan yang tinggi dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para bawahan/staf anggota organisasi, dan lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, serta memberikan nasehat dalam rangka mencapai tujuan dengan melibatkan masyarakat dengan tetap berkomitmen/mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra, Perda, APBD dan APBN serta tidak melanggar Undang-Undang.
- (2). Persepsi masyarakat atas gaya kepemimpinan tersebut yang dapat dipergunakan ikut berpartisipasi pada pemerintahan daerah adalah cenderung lebih dominan mengarah pada gaya kepemimpinan partisipatif dan konsultatif atau menggunakan gaya kepemimpinan campuran/gabungan, yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dan memberikan kepercayaan kepada bawahan dalam melaksanakan program-programnya.
- (3). Model/gaya kepemimpinan yang diusulkan lebih ideal dan rasional sesuai dengan harapan dan keinginan stakeholder, maka model gaya kepemimpinan kolaborasi adalah yang paling sesuai situasi dan kondisi di daerah penelitian, yaitu kolaborasi gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan konsultatif dan gaya kepemimpinan transformasional.
- (4). Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan dan kapasitas karyawan dalam melaksanakan program kerja pemerintah di seluruh SKPD-SKPD pada pemerintah Kabupaten/ Kota, untuk menyongsong Reformasi Birokrasi 2005-2025, hendaknya seluruh Bupati dan Walikota dan pejabat dapat memberikan peluang dan memotivasi kepada seluruh karyawan untuk mengikuti program kerja tersebut.

Daftar Pustaka

- Davis, Keith, 1972, *Human Behavior at Work*, Forth Edition, McGraw Hill.
- Danandjaya, 1983. *Manajemen Kewirausahaan*, Jakarta Harvarindo.
- Dwivedi, R.S., 1979. *Human Relations and Organizational Behavior*. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co.
- Gibson, at all.2004. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta, Bina Rupa Aksara.
- Goesch, Davis, 1997. *Quality Management*, Third Edition, Prentice Hall International Houghton Mifflin Company, Boston New York.

- Hasibuan, Malayu SP, 2003. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hemphil, J.K., and Coons, A.E. 1957. *Development of The Leader Behavior Description Questionnaire*. In R.M. Stogdill and A.E. Coons (Eds.), *Leader Behavior: Its Description and Measurement*. Columbus Ohio: Bureau of Business Research, Ohio State Univercity, p.p. 6-38.
- Hersey, Paul dan Kenneth H. Blanchard, 1992, Terjemahan, "Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- James L. Gibson, John Ivanchevich, dan James Donnley, Jr., Terjemahan, *Organisasi: "Perilaku, Struktur dan Proses"*, Penerbit Erlangga, Jakarta. (1992:337).
- Kartono, Kartini.1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rajawali.
- Katz, D., and Kahn, R.L. 1978. *The Socil Psycology of Organizations*, second edition, New York: John Wiley.
- Koontz, Harold and Cyril O'Donelly,1984. Management. McGraw-Hill Book Company. New Delhi
- Little John and Y. Choong, 1996. *Quality Management by Small Manufactures in Korea. Exploratory Study, Journal of Small Busines Management*, October, p.p. 61-67.
- Mangunhardjono, 1976. *Perjanjian Kerja*, Bandung Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, Mathew dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press.
- Rauch, C.F., and Behling, O. 1984. *Functionalism, Basis for Alternate Approach To The Study of Leadership*. In J.G. Hunt D.M. Hosking, C.A. Schriesheim, and R. Stewart (Eds.) *Leadership and Manager*.
- Siagian, Sondang P., 1994, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi,1987. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali
- Stogdill, R.M. 1974. *Handbook of Leadership. A Survey of The Literature*, New York: Free Press.
- Stoner, James A.F. and Freeman Edward R. Gilbert. 1996. *Manajemen*, Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Thoha Miftah, 1999, *Kepemimpinan Dalam manajemen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yukl.G. 1994. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Prenhallindo. Edisi Bahasa Indonesia.

ANALISIS KEPEMIMPINAN DALAM MEMBANGUN PERSEPSI MASYARAKAT (Studi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur)

Moestien Adi Puji Pembayu Muattininggar^{1*}, Teguh Prasetyo², Mahmud Ridho Ardi³
 1,2,3Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: moestienadi@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peran Kepemimpinan diamanahkan dalam tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Otonomi daerah menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur negara. Sehingga peran dan gaya kepemimpinan partisipatoris sangat dibutuhkan, karena dapat menentukan arah kebijakan dari pelaksanaan otonomi daerah. Sesuai dengan kajian penelitian, maka perumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimanakah gaya kepemimpinan kepala daerah di Jawa Timur dalam membangun persepsi masyarakat? (2) Bagaimanakah persepsi masyarakat atas gaya kepemimpinan kepala daerah tersebut? (3) Bagaimanakah model gaya kepemimpinan kepala daerah yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat ikut berpartisipasi pada tata pemerintahan daerah?. Kajian ini dilakukan di tiga pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pamekasan, dan Kota Kediri. Adapun temuan penelitian tersebut: (1) Kepala Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan yang tinggi dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para bawahan/staf anggota organisasi, dan lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, serta memberikan nasehat dalam rangka mencapai tujuan dengan melibatkan masyarakat. (2) Cenderung lebih dominan mengarah pada gaya kepemimpinan partisipatif dan konsultatif. (3) Model gaya kepemimpinan kolaborasi adalah yang paling sesuai situasi dan kondisi di daerah penelitian, yaitu kolaborasi gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan konsultatif dan gaya kepemimpinan transformasional.

Kata Kunci: *gaya kepemimpinan, partisipasi, persepsi masyarakat*

Pendahuluan

Peran Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanahkan dalam tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan sepenuhnya kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah. Di era otonomi daerah, dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur negara. Sehingga peran dan gaya kepemimpinan partisipatoris sangat dibutuhkan, karena dapat menentukan arah kebijakan dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam negara yang penuh kompetisi ini, sangat diperlukan kemampuan seorang pemimpin dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan (responsive) terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil, dan efektif yang didukung dari persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Munculnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan konsekwensi dari komitmen terhadap demokrasi, sehingga perlu diupayakan agar pemimpin dalam otonomi daerah dapat membangkitkan persepsi dan

partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam program-program pemerintah. Layanan publik kepada masyarakat tidak hanya semata-mata berdasarkan pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga unsur kebersamaan (equality). Sehingga perlu kesetaraan antara nilai efisiensi dan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan antara kepemimpinan daerah bersama-sama masyarakat.

Memasuki perubahan dunia globalisasi yang begitu cepat, kita dihadapkan paling tidak dua tantangan, yaitu tantangan perubahan dari (1) masyarakat agraris ke masyarakat industri, dan (2) tantangan dalam menerima arus perubahan peradaban masyarakat pasca industri. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan baru kepada masyarakat dan lingkungannya terhadap perubahan dan penyusuaian paradigma dan praktik gaya kepemimpinannya dalam pemerintahan dan pembangunan. Reformasi desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001, merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Sejak awal penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa, sehingga menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula. Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata kelola pemertintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarakat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses perencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi. Sedikitnya untuk dua alasan: pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, salah satu unsur terpenting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin partisipatoris adalah kemampuan berpikir dan bergelut dengan imajinasi dan kemungkinan-kemungkinan yang melahirkan hubungan-hubungan serta temuan-temuan baru yang bermakna tinggi, dengan berinteraksi pada gagasan-gagasan/usulan masyarakat, dan lingkungan hidup. Unsur penting lainnya yang perlu diperhatikan seorang pemimpin kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dibentuknya kreativitas yang tinggi dalam organisasi untuk kepentingan masyarakat, seperti contohnya sebagai berikut:

- (1). Pentingnya mendorong kreatifitas aparatur pemerintah, agar mampu menciptakan sesuatu yang baru, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2). Melakukan perubahan cara kerja tradisional menuju manajemen modern, yaitu mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan warga dalam perumusan

kebijakan dan pengambilan keputusan oleh Bupati sebagai kepala daerah, kembali mencuat sebagai topik yang menarik perhatian pada masyarakat luas akhir-akhir ini, akademisi maupun praktisi di bidang tata pemerintahan dan politik lokal di Indonesia. Terkait dengan ini, ada satu pertanyaan penting yang tetap sulit dijawab secara gampang, yaitu sudah sampai dimanakah proses keterlibatan warga dalam tata pemerintahan daerah berlangsung?, karena dengan tidak dilibatkannya warga masyarakat akan membawa dampak yang luas dalam arti kata banyak korban (seperti kasus Mesuji di Lampung dan Sape di NTB baru-baru ini), hal ini semuanya disebabkan tergantung dari gaya kepemimpinan Bupati sebagai kepala daerah. Walaupun berbagai reformasi untuk mendorong partisipasi yang lebih mendalam dan meluas telah dilakukan, tetapi tetap masih ada keraguan bahwasanya partisipasi di Indonesia sudah “berjalan” dengan baik. Berbagai publikasi terkini tentang praktik-praktik partisipasi warga di Indonesia yang dituliskan berdasarkan pengalaman empirik mengemukakan dua realita (1), di satu sisi kehidupan berpartisipasi lebih berkembang, namun di sisi lain, (2), terungkap adanya sejumlah tantangan serius yang tidak saja dapat mengurangi efektivitas partisipasi, bahkan mengancam keberkelanjutannya era otonomi daerah.

Gaya Kepemimpinan merupakan suatu cara yang dimiliki oleh seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat dan keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya. Di berbagai daerah Provinsi Jawa Timur, bahkan sudah ada pemerintah daerah dan atau DPRD, yang telah melaksanakan berbagai tindakan dengan sungguh-sungguh untuk merespon keinginan dari masyarakatnya untuk mendapatkan akses yang lebih baik dan ikut dalam proses pengambilan keputusan publik (strategi dan kebijakan) melalui penciptaan berbagai kesempatan partisipasi yang berkelanjutan, semuanya itu tergantung dari kepemimpinan Bupati sebagai kepala daerah. Indikasi positif lainnya dapat dilihat melalui meningkatnya kualitas partisipasi yang dijalankan, makin inklusifnya masyarakat, semakin banyaknya aturan dan kerangka hukum yang mengatur partisipasi dan juga semakin besarnya sumber daya (dana) yang bisa digunakan untuk membiayai program yang dirumuskan melalui proses kepemimpinan partisipatoris.

Metode

Tipe Penelitian ini berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota pada SKPD-SKPD di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pamekasan, dan Kota Kediri. Penentuan informan secara purposive pada masing-masing obyek penelitian. Berdasarkan atas sumber data diperoleh, jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara sebagai berikut:

(1). Wawancara; wawancara dilakukan secara langsung dengan responden (Bupati, Sekda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dewan dan tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Desa/Lurah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Wartawan) secara mendalam (indepth interview) tentang fenomena penelitian yang dikaji.

(2). Kuesioner; yaitu membagikan kuesioner kepada responden secara langsung untuk mengetahui kadar atau bobot penerapan gaya kepemimpinan kepala pemerintah daerah dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Guna melengkapi data-data primer, peneliti juga menggali data sekunder yang relevan yang diperoleh dengan cara:

(1). Studi dokumen dan literatur; yaitu mengumpulkan data yang tersedia dalam bentuk laporan-laporan maupun dalam bentuk lain yang terdokumentasi yang relevan dengan fenomena yang dikaji.

(2). Studi Hasil Evaluasi, yaitu studi evaluasi terhadap berbagai produk kebijakan pemerintah daerah menyangkut proses maupun pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah diputuskan.

Hasil

Terdapat beberapa pengertian kepemimpinan yang diutarakan oleh beberapa pakar sumber daya manusia; diantaranya Hemphill dan Coons (1957), mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah perilaku individu dalam mengarahkan aktifitas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. (Tannenbaum, Weschler, dan Massanik, 1961). Kemudian Stogdill (1974), mendefinisikan kepemimpinan sebagai pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi.

Selanjutnya kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi (Katz dan Kahn, 1978). Kemudian Rauch dan Behling (1984), mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Dwivedi (1979), mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses mempengaruhi orang lain untuk memobilisasikan dan mengarahkan usaha mereka kepada tujuan tertentu dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Koontz dan O'Donnell (1980), menyatakan bahwa kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk ikut serta dalam pencapaian tujuan umum. Jacob dan Jacques (1990), mendefinisikan kepemimpinan sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Gibson dan kawan-kawan (1985), mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku kelompok tanpa paksaan. Kemampuan mempengaruhi dalam hal ini berhubungan dengan pemuasan kebutuhan bawah. Menurut (Stoner et al., 1996), mendefinisikan kepemimpinan manajerial sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas yang berkaitan dengan tugas anggota kelompok.

Jika definisi di atas dikaji lebih jauh, maka ada beberapa perbedaan dan persamaan penekanan. Sebagian menekankan pada kemampuan seseorang mengarahkan orang lain, lainnya menekankan pada kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan pada situasi tertentu. Implikasi semua definisi tersebut adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan lebih untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dalam pencapaian tujuan. Stoner et al. (1996), secara rinci mengemukakan implikasi definisinya sebagai berikut:

(1). Kepemimpinan melibatkan orang lain (karyawan atau pengikut). Kemauan mereka menerima pengarahan dari pemimpin dan membuat proses kepemimpinan menjadi mungkin, tanpa orang yang dipimpin, semua mutu kepemimpinan dan seorang manajer menjadi tidak relevan.

(2). Kepemimpinan melibatkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara pemimpin dan anggota kelompok. Anggota kelompok bukannya tanpa kekuasaan, mereka dapat dan membentuk aktivitas kelompok dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, pemimpin biasanya mempunyai kekuasaan lebih besar.

(3). Kepemimpinan adalah kemampuan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi tingkah laku pengikut dengan berbagai cara. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya harus mempunyai kekuasaan, mereka dapat dan membentuk aktivitas kelompok dengan berbagai cara. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya harus mempunyai kekuasaan, mereka dapat dan membentuk aktivitas kelompok dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, pemimpin biasanya mempunyai kekuasaan lebih besar.

(4). Kepemimpinan menggabungkan tiga aspek pertama dan mengakui bahwa kepemimpinan adalah mengenai nilai.

Jika pengertian kepemimpinan yang diajukan oleh Tannembaum (1961), maka bila dikaji lebih jauh, hal yang menarik adalah proses interaksi dan sating mempengaruhi antar pribadi. Hal ini berarti bahwa aktivitas kepemimpinan akan berjalan dengan baik, kalau terjadi hubungan timbal batik melalui proses komunikasi yang jelas. Pemahaman ini mengarah kepada teori pertukaran sosial yang kemudian berkembang menjadi salah satu pendekatan dalam kajian interaksi pemimpin dengan bawahan atau pengikutnya. Walaupun definisi kepemimpinan memiliki berbagai rumusan dengan berbagai perbedaan, akan tetapi pada hakekatnya ada beberapa anasir utama yang menggerakkan jalannya proses kepemimpinan, yaitu adanya pemimpin, bawahan, tujuan yang ingin dicapai, dan situasi tertentu. Goestsch dan Devis (1997), berpendapat, ada tiga faktor yang mempengaruhi organisasi dalam mengimplementasikan kegiatannya sesuai dengan rencana, yaitu kepemimpinan, fasilitas dan komitmen manajemen. Kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan sehingga orang-orang termotivasi dalam pencapaian tujuan tertentu. Dari definisi di atas terlihat bahwa hubungan yang dilakukan pimpinan merupakan upaya kepemimpinan dan proses komunikasi dalam kegiatan itu menjadi penting (Gibson et al.).

Ada kepemimpinan tercermin pada interaksi yang terjadi kemudian menimbulkan pengikut. Menurut pandangan lama bahwa kepemimpinan merupakan sifat yang dibawa sejak lahir. Ada beberapa sifat penting bagi pimpinan yang berlaku secara universal. Sifat-sifat pimpinan yang berhasil seperti suka bergaul, disiplin, bekerja keras, kemudian muncul pandangan yang berdasar pada:

- (1). Hubungan antara perilaku pimpinan dan performa bawahan dan kepuasan bawahan.
- (2). Fungsi pemeliharaan yang mempengaruhi tingkah laku anggota terhadap pengembangan dan kekuatan organisasi unit kerja.
- (3). Non fungsional dan disfungsional yaitu suatu kegiatan yang tidak membantu kelompok bahkan membahayakan organisasi tersebut.

Pengertian pemimpin seringkali disamakan dengan pimpinan, padahal pemimpin dan pimpinan mempunyai perbedaan yaitu kata mempengaruhi (to influence) merupakan kata kunci yang selalu identik dengan peran pemimpin (leader). sedangkan kata menggerakkan (to actuate) biasanya terkait dengan peran pemimpin (manager). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Mangunhardjono (1976) yang mengemukakan sebagai

berikut : "Pemimpin disebut juga leader, akar katanya to lead yang mengandung beberapa pengertian yang saling berhubungan yaitu bergerak lebih awal, berjalan didepan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran, pendapat, tindakan orang lain, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Dalam kehidupan berorganisasi, tidaklah bisa dihindarkan adanya dua peran, disatu pihak sebagai pimpinan dan dipihak lain sebagai bawahan. Dalam hal ini pimpinan berperan amat penting dalam mencapai tujuan organisasi, namun eksistensi bawahan tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa keikutsertaan bawahan maka organisasi itu akan menemui kesulitan dalam mencapai tujuan. Sukses tidaknya dalam mencapai tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan dalam mengajak dan menyakinkan mereka, sehingga para bawahan tersebut ikut berpartisipasi terhadap apa yang telah dianjurkan dengan penuh semangat. Oleh sebab itu, pimpinan seharusnya dapat membujuk, memerintah, mempengaruhi dan memberi semangat bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pada suatu perusahaan atau organisasi bila bawahan tidak termotivasi untuk bekerja, tingginya absensi, rendah moral serta ketidakpuasan ini menandakan pemimpin tidak dapat memotivasi bawahan karena penerapan gayanya yang tidak sesuai dengan lingkungan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pemimpin harus dapat menunjukkan cara/gaya supaya bawahan dapat bekerja dengan baik.

Oleh karena itu, bila seorang pemimpin ingin lebih mudah mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan tugas bawahan harus memahami bahwa kemauan dan kemampuan bawahan sening kali berbeda. Seperti yang dinyatakan oleh Tunggal (1996), ada empat variasi kemauan dan kemampuan bawahan yaitu:

- (1). Ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu.
- (2). Ada bawahan yang tidak mau tapi tidak mampu.
- (3). Ada bawahan yang tidak mau walau mampu.
- (4). Ada bawahan yang mau dan mampu.

Walaupun demikian, menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (dalam Tunggal, 1996) tidak ada satu gaya yang terbaik yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan secara efektif. Sehingga gaya kepemimpinan sangat terkait dengan tingkat kematangan (kedewasaan) bawahan yang akan dipimpinnya. Salah satu pakar ekonomi yang memperhatikan organisasi adalah Frederick Taylor (1911). Pemikiran Taylor menekankan bagaimana menciptakan upah yang layak pada bawahan dengan menganggap bawahan sebagai alat produksi, sehingga para bawahan haruslah mengejar jumlah produksi yang telah ditetapkan dan bawahan dibayar sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Menurut Taylor orang akan cukup puas dengan hasil pekerjaannya, manusia bekerja layaknya mesin oleh karena itu bawahan tidak perlu berinteraksi satu dengan lain. Taylor menganggap tidak perlu memperhatikan faktor motivasi bawahan. Dalam studi tentang kepemimpinan dalam organisasi, maka teori kepemimpinan dapat diklasifikasikan atau dibedakan sebagai berikut: (1) kepemimpinan menurut Teori Sifat; (2) kepemimpinan menurut Teori Perilaku; (3) kepemimpinan menurut Teori Situasional.

Teori Kepemimpinan menurut Teori Sifat

Pendekatan menurut teori ini, dipandang sebagai suatu kombinasi dari sifat atau ciri individu yang tampak pada seorang pemimpin. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa

dapat ditemukan sejumlah individu terbatas dari kepemimpinan yang efektif. Ciri-ciri tersebut antara lain: menyangkut tentang intelektualitas, emosional, fisik, kepercayaan diri, pengendalian berbicara dan lain-lain. Menurut Keith Davis yang diikuti Thoha (1995), mengatakan ada empat sifat utama yang berpengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan dalam suatu organisasi, yaitu: kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi serta sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Dalam Stogdill's Handbook of Leadership, Bernard M. Bass yang dikutip oleh Gibson (1992), dalam membuat ringkasan dari sifat-sifat pemimpin yang paling banyak diteliti seperti dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 1. Sifat-sifat yang Dikaitkan dengan Keefektifan Kepemimpinan

| Kecerdasan | Kepribadian | Kemampuan |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Pertimbangan | Kemampuan Adaptasi | Kemampuan memperoleh Kerjasama |
| Ketegasan | Kewaspadaan | Kerjasama |
| Pengetahuan | Kreatifitas | Popularitas dan Prestise |
| Kefasihan Berbicara | Integritas Pribadi | Kemampuan Bergaul |
| | Percaya Diri | Partisipasi Sosial |
| | Keseimbangan dan Pengendalian Emosional | Bijaksana dan Diplomasi |
| | Mandiri | |

Sumber: *James L. Gibson, John Ivancevich, dan James Donnley, Jr. Terjemahan, Organisasi: "Perilaku, Struktur dan Proses", Penerbit Erlangga, Jakarta. (1992:337).*

Walaupun sifat yang dikemukakan secara normatif merupakan sifat ideal yang diinginkan dalam diri seorang pemimpin, kenyataannya tidak seorangpun pemimpin memiliki seluruh sifat ideal secara sempurna. Hal ini tampak terutama pada adanya perbedaan-perbedaan dalam sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki setiap orang.

Teori Kepemimpinan menurut Teori Perilaku

Beberapa gaya kepemimpinan menurut teori perilaku adalah sebagai berikut:

1. Teori X dan Y dari Douglas McGregor

Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan seseorang dipengaruhi oleh anggapan-anggapan pemimpin terhadap sifat dasar manusia, anggapan-anggapan tersebut terbagi menjadi dua. Anggapan-anggapan *Teori X* adalah sebagai berikut:

(1). Rata-rata pembawaan manusia malas, tidak suka akan pekerjaan dan cenderung untuk menghindarinya.

(2). Agar orang mau menjalankan tugasnya, maka orang harus dipaksa, diawasi, diarahkan dan diancam dengan hukuman.

(3). Pada umumnya manusia lebih suka diarahkan, ingin menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi relatif kecil dan menginginkan keamanan hidup diatas segala-galanya.

Sedangkan anggapan-anggapan *Teori Y* adalah sebagai berikut :

(1). Bekerja adalah kodrat manusia, seperti halnya bemain dan istirahat.

- (2). Pengawasan dan ancaman hukuman bukanlah satu-satunya cara dalam mencapai tujuan organisasi, orang akan melakukan pengendalian diri dan pengarahan diri untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
- (3). Keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berhubungan dengan prestasi mereka.
- (4). Rata-rata manusia dalam kondisi yang layak, belajar tidak hanya untuk menerima tetapi juga bertanggung jawab.
- (5). Potensi besar untuk melakukan imajinasi, kecerdikan dan kreatifitas dalam penyelesaian masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar pada seluruh karyawan.
- (6). Potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan industri modern.

McGregor mengatakan bahwa seorang pimpinan yang menganut anggapan-anggapan Teori X, akan menyukai gaya kepemimpinan otokratis, sebab pemimpin yang bergaya otokratis mempunyai asumsi bahwa kuasa pemimpin berasal dari posisi yang mereka miliki dan orang-orang yang dipimpinnya pembawaan malas serta tidak percaya diri. Sebaliknya, pemimpin yang mengikuti anggapan-anggapan Teori Y, akan lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratis, sebab mempunyai asumsi bahwa kuasa pemimpin berasal dari kelompok yang dipimpin dan orang-orang yang dipimpin pada dasarnya dapat mengarahkan dirinya sendiri dan kreatif di tempat kerja apabila dimotivasi dengan tepat. Hersey dan Blanchard juga menjelaskan bahwa kepemimpinan situasional tidak hanya mengajukan gaya kepemimpinan yang paling tinggi kemungkinan efektifitasnya bagi berbagai tingkat kematangan, tapi juga menunjukkan kemungkinan berhasil dari gaya lainnya apabila pemimpin tidak dapat menerapkan gaya yang paling tepat.

Tabel 2. Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan berbagai tingkat kematangan bawah

| Level Kematangan | Gaya yang Sesuai |
|--|---|
| M ₁ Rendah Mau dan yakin tapi tidak mampu | G ₁ Memberitahukan perilaku tinggi tugas dan rendah hubungan |
| M ₂ Rendah ke sedang Mulai mampu tapi tidak mau atau tidak yakin | G ₂ Menjual Perilaku tinggi tugas dan tinggi hubungan |
| M ₃ Sedang ke tinggi Mampu tapi tidak mau atau tidak yakin | G ₃ Mengikutsertakan perilaku tinggi hubungan rendah dan rendah tugas |
| M ₄ Tidak Mampu / kompeten dan mau / yakin | G ₄ Mendelegasikan perilaku rendah hubungan dan rendah tugas |

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, Terjemahan, "Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia", Penerbit Erlangga, Jakarta, (1992:183).

Kemungkinan berhasil dari masing-masing gaya bagi keempat kematangan bawah ini tergantung pada sejauh mana gaya tersebut mempunyai kemungkinan efektif paling tinggi. Tingkat efektifitas dari masing-masing gaya kepemimpinan terhadap berbagai tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Tingkat Efektifitas Masing-masing Gaya terhadap Berbagai Tingkat Kematangan

| Kematangan | Gaya Terbaik | Gaya Terbaik Kedua | Gaya Terbaik Ketiga | Gaya Tak Efektif |
|----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| M ₁ | G ₁ | G ₂ | G ₃ | G ₄ |
| M ₂ | G ₂ | G ₁ /G ₃ | - | G ₄ |
| M ₃ | G ₃ | G ₂ /G ₄ | - | G ₁ |
| M ₄ | G ₄ | G ₃ | G ₁ | G ₁ |

Sumber: *Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, Terjemahan, "Manajemen Perilaku Organisasi. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia", Penerbit Erlangga, Jakarta, (1992:281).*

Pembahasan

Berbeda dengan pemikiran tentang gaya kepemimpinan di atas, menurut study kepemimpinan Universitas Iawa dalam Nawawi dan Martini, (1992) ada tiga gaya kepemimpinan.

(1). *Gaya Kepemimpinan Otoriter*, keputusan atau wewenang, sebagian besar mutlak berada pada pimpinan. Proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin dan bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

(2). *Gaya Kepemimpinan Demokrasi*, adanya pembagian kekuasaan atau wewenang yang jelas yang tidak mulak berada pada pimpinan, sedangkan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, kebijaksanaan ditetapkan bersama-sama dan bawahan di ikutsertakan untuk memberi saran, ide dan pertimbangannya dalam proses pengambilan keputusan, serta menimbulkan tanggung jawab bagi pemimpin.

(3). *Gaya Kepemimpinan Bebas (Laissez Faire)*, kepemimpinan yang sepenuhnya diserahkan pada orang-orang yang dipimpin oleh karena itu setiap orang yang mempunyai kemampuan dan kehendak sendiri maka akan berakibat suasana kebersamaan tidak tercipta, kegiatan tidak searah dan simpang siur. Wewenang tidak jelas dan tanggung jawab menjadi kacau, setiap anggota saling menuduh dan saling salah menyalahkan atau lempar melempar jika meminta pertanggung jawaban.

Pola perilaku seorang pemimpin dalam sebuah organisasi menjadi salah satu penentu bagi keberhasilan organisasi bersangkutan untuk mencapai tujuannya, karena terkait dengan penerapan nilai-nilai budaya yang diberlakukan bagi seluruh anggota organisasi tersebut. Pemimpin dan budaya organisasi menjadi satu kesatuan utuh yang saling berkaitan dan berpengaruh dalam menentukan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam praktiknya, dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut berkembang beberapa tipe kepemimpinan, di antaranya adalah sebagian berikut.

(1). *Tipe Otokratis*, adalah pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri-ciri (a) menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi; (b) mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi; (c) menganggap bawahan sebagai alat semata-mata; (d) tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat; (e) terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya; (f) dalam tindakan penggerakkannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum.

(2). *Tipe Militeristik*, tipe pemimpin ini berbeda seperti seorang pemimpin tipe militerisme atau seorang pemimpin dalam organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat (a) dalam menggerakkan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan; (b) dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya; (c) senang pada formalitas yang berlebih-lebihan; (d) menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan; (e) sukar menerima kritikan dari bawahannya; (f) menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

(3). *Tipe Paternalistik*, seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin paternalistik adalah seorang yang memiliki ciri-ciri (a) menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa; (b) bersikap terlalu melindungi (*overly protective*); (c) jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan; (d) jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif; (e) jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya; (f) dan sering bersikap maha tahu.

(4). *Tipe Karismatik*, hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan karena pada umumnya, mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang sebab musabab seseorang menjadi pemimpin yang *karismatik*, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (*supra natural powers*). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma, misalnya; Gandhi bukanlah seorang yang kaya, Iskandar Zulkarnain bukanlah seorang yang fisik sehat, John F Kennedy adalah seorang pemimpin yang memiliki karisma meskipun umurnya masih muda pada waktu terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat.

(5). *Tipe Demokratis*, pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern saat ini, hal ini terjadi karena tipe kepemimpinan ini memiliki karakteristik (a) dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia; (b) selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan

dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari pada bawahannya; (c) senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya; (d) selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan *teamwork* dalam usaha mencapai tujuan; (e) ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain; (f) selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya; (g) berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokratis bukanlah hal yang mudah, namun, karena pemimpin yang demikian adalah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua pemimpin berusaha menjadi seorang pemimpin yang demokratis.

Berdasarkan analisis tersebut, maka model gaya kepemimpinan bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akan datang yang dapat menjadi alternatif terbaik bagi Kepala Daerah dalam menggunakan gaya kepemimpinannya. Sehingga dengan demikian, maka model/gaya kepemimpinan yang diusulkan adalah model gaya kepemimpinan kolaborasi, yaitu kolaborasi gaya kepemimpinan partisipatif, konsultatif dan gaya kepemimpinan transformasional. Adapun model yang ideal dan rasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

| Gaya Kepemimpinan | Penjelasan |
|---------------------------|---|
| Kepemimpinan Partisipatif | <ul style="list-style-type: none"> a. Cenderung memberikan kepercayaan kepada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tanggung jawab yang harus diselesaikan. b. Lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan keputusan. c. Memberikan dukungan yang tinggi dan pengarahan yang rendah kepada bawahan. d. Selalu memonitor, mengawasi pendeklegasian terhadap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan atau staf. |
| Kepemimpinan Konsultatif | <ul style="list-style-type: none"> a. Lebih banyak melakukan Interaksi dengan para bawahan/staf dan anggota organisasi. b. Banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, memberikan nasehat dalam rangka mencapai tujuan kepada bawahan. c. Memberikan pengarahan sangat tinggi serta dukungan tinggi, tetapi juga berusaha mendengar keluhan-keluhan bawahan mengenai keputusan juga ide-ide dan saran dari bawahan. d. Pengawasan terhadap pengambilan keputusan tetap pada Bupati. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Kepemimpinan Transformasional | <ul style="list-style-type: none"> a. Selalu memiliki kepercayaan diri yang kuat, hadir disaat-saat sulit, memegang teguh nilai-nilai moral, dan menumbuhkan kebanggaan pada bawahan, serta mempunyai visi jelas (<i>attributed charisma</i>). b. Langkah-langkahnya selalu mempunyai tujuan yang pasti, dan agar bawahan mengikutinya secara sukarela. c. Berusaha memotivasi, membangkitkan semangat dan minat bawahan, disamping itu tetap berusaha meyakinkan akan tujuan dan misi organisasi. d. Berusaha melihat, memperhatikan, mengenali kemampuan individu yang berguna untuk organisasi. e. Berusaha meyakinkan bawahan bahwa untuk bersama-sama menciptakan produktivitas kerja tinggi, usaha keras, komitmen, dan kapasitas kerja yang tinggi. |
|-------------------------------|---|

Akhirnya, hasil penelitian ini bahwa model gaya kepemimpinan yang dikemukakan sebagai alternatif bagi Kepala Daerah dalam menjalankan tata pemerintahan bukanlah gaya kepemimpinan yang satu-satunya. Peneliti menyadari bahwa gaya kepemimpinan yang dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi dan partisipasi dalam tata pemerintahan sebagian besar tergantung pada situasi dan kondisi. Apa yang merupakan gaya kepemimpinan efektif dalam suatu situasi dapat menjadi tidak kompeten dan tidak efektif dalam situasi lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan didukung analisis seperti yang telah diuraikan di atas, serta memperhatikan permasalahan penelitian dan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

(1). Gaya kepemimpinan Kepala Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang sebagai obyek penelitian yaitu; Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pamekasan dan Kota Kediri adalah memberikan dukungan yang tinggi dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para bawahan/staf anggota organisasi, dan lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, serta memberikan nasehat dalam rangka mencapai tujuan dengan melibatkan masyarakat dengan tetap berkomitmen/mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra, Perda, APBD dan APBN serta tidak melanggar Undang-Undang.

(2). Persepsi masyarakat atas gaya kepemimpinan tersebut yang dapat dipergunakan ikut berpartisipasi pada pemerintahan daerah adalah cenderung lebih dominan mengarah pada gaya kepemimpinan partisipatif dan konsultatif atau menggunakan gaya kepemimpinan campuran/gabungan, yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dan memberikan kepercayaan kepada bawahan dalam melaksanakan program-programnya.

(3). Model/gaya kepemimpinan yang diusulkan lebih ideal dan rasional sesuai dengan harapan dan keinginan stakeholder, maka model gaya kepemimpinan kolaborasi adalah

yang paling sesuai situasi dan kondisi di daerah penelitian, yaitu kolaborasi gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan konsultatif dan gaya kepemimpinan transformasional.

Daftar Pustaka

- Davis, Keith, 1972. *Human Behavior at Work*, Forth Edition, McGraw Hill.
- Danandjaya, 1983. *Manajemen Kewirausahaan*, Jakarta Harvarindo.
- Dwivedi, R.S., 1979. *Human Relations and Organizational Behavior*. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co.
- Gibson, at all.2004. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta, Bina Rupa Aksara.
- Goeschth, Davis, 1997. *Quality Management*, Third Edition, Prentice Hall International Houghton Mifflin Company, Boston New York.
- Hasibuan, Malayu SP, 2003. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hemphil, J.K., and Coons, A.E. 1957. *Development of The Leader Behavior Description Questionnaire*. In R.M. Stogdill and A.E. Coons (Eds.), *Leader Behavior: Its Description and Measurement*. Columbus Ohio: Bureau of Business Research, Ohio State Univercity, p.p. 6-38.
- Hersey, Paul dan Kenneth H. Blanchard, 1992, Terjemahan, "Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- James L. Gibson, John Ivanchevich, dan James Donnley, Jr., Terjemahan, *Organisasi: "Perilaku, Struktur dan Proses"*, Penerbit Erlangga, Jakarta. (1992:337).
- Kartono, Kartini.1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rajawali.
- Katz, D., and Kahn, R.L. 1978. *The Socil Psycology of Organizations*, second edition, New York: John Wiley.
- Koontz, Harold and Cyril O'Donelly,1984. Management. McGraw-Hill Book Company. New Delhi
- Little John and Y. Choong, 1996. *Quality Management by Small Manufactures in Korea. Exploratory Study, Journal of Small Busines Management*, October, p.p. 61-67.
- Mangunhardjono, 1976. *Perjanjian Kerja*, Bandung Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, Mathew dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press.

- Rauch, C.F., and Behling, O. 1984. *Functionalism, Basis for Alternate Approach To The Study of Leadership*. In J.G. Hunt D.M. Hosking, C.A. Schriesheim, and R. Stewart (Eds.) *Leadership and Manager*.
- Siagian, Sondang P., 1994, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 1987. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali
- Stogdill, R.M. 1974. *Handbook of Leadership. A Survey of The Literature*, New York: Free Press.
- Stoner, James A.F. and Freeman Edward R. Gilbert. 1996. *Manajemen*, Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Thoha Miftah, 1999, *Kepemimpinan Dalam manajemen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yukl.G. 1994. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Prenhallindo. Edisi Bahasa Indonesia.